

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017-2021

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Manajemen Keuangan Syariah



Oleh :

Miftakur Rohmad

NIM : 504190049

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftakur Rohmad
NIM : 504190049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian dari pernyataan tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Dibuat di : Jambi
Pada Tanggal : 8 April 2023
Yang menyatakan



Miftakur Rohmad
504190049

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, 8 April 2023

Pembimbing I : Prof. Dr. As'ad Isma, M.Pd
Pembimbing II : Fauzan Ramli, SE., ME
Alamat : Fakultas ekonomi dan bisnis islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura 36122
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

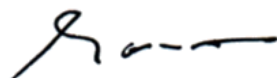
Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca dan melakukan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara: Miftakur Rohmad NIM: 504190049 yang berjudul "**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga dapat bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I



Prof. Dr. As'ad Isma, M.Pd
NIP. 19690312199402000

Pembimbing II



Fauzan Ramli, SE., ME
NIDN.2011129302



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-16 /D.V/PP.00.3/07/2023

Skripsi dengan judul “judul skripsi ” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Miftakur Rohmad
NIM : 504190049
Tanggal ujian skripsi : 03 Juli 2023
Nilai munaqasyah : 77,56

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Drs. Arsa M.H.I

NIP. 196212291993021001

Penguji I

Erwin Saputra Siregar, M.E

NIP. 199012312019031019

Pembimbing I

Prof. Dr. As'ad Isma, M.Pd

NIP. 196903121994021000

Sekretaris Sidang

Nurrahma Saki Putri, M.B.A

NIDN. 2003049302

Penguji II

Achyat Budianto, M.E

NIDN. 2006117702

Pembimbing II

Fauzan Hamli, M.E

NIDN. 2011129302

Jambi, 03 Juli 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan

Dr. A.A. Miftah, M.Ag

NIP. 19731251996031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu .” (Qs. an-Nisa’4:135)”¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Bandung: PT . Syaamil Cipta Media, 2005).hlm 100

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan limpahan rahmat. Karunia-mu Ya Allah Karena Mu lah Hamba dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriring salam tak lupa pula saya haturkan kepada Sayyidina Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh kemuliaan serta ilmu pengetahuan.

Dan dengan Do'a yang tulus dari orang tua yaitu, Bapak (Rohmad) dan Ibu (Siti Kholifah), dan tak lupa pula kakak (Musyafaah) Terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir hingga saya sudah besar seperti ini, yang tak henti-hentinya memberi dukungan selama ini terimakasih atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah kalian lakukan semua yang terbaik.

Kemudian tak lupa Pahlawan tanpa Jasa untuk kedua pembimbing saya Bapak Prof. Dr. As'ad Isma, M.Pd dan Bapak Fauzan Ramli,SE.,ME Terimakasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya karena berkat Ilmu, Kesabaran dalam mendidik saya bisa menyelesaikan Skripsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jember

ABSTRAK

Pengukuran Kinerja sangat penting untuk menilai seberapa baiknya organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, dan bukan hanya sekedar kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang tersebut telah digunakan secara adil, demi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kinerja Keuangan Bakeuda Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2017-2021 dilihat dari: Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi Rasio Kecerahan (belanja operasional dan belanja modal). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kualitas berupa (jumlah dan angka).

Hasil dari analisis Kinerja menunjukkan keuangan Bakeuda Pemerintah Kabupaten Tebo dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,73%, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan cukup efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Tebo sebesar 80,08%, Rasio Kecerahan diketahui bahwa rata-rata belanja operasional daerah masih sangat tinggi yaitu 72,20% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 25,90% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kecerahan

ABSTRACT

Performance measurement is very important to assess how well organizations and managers are in more public services, and not just the ability to show that public money has been spent but includes the ability to show that the money has been used fairly, for the welfare of society. aims to analyze how the Bakeuda Financial Performance of the Tebo Regency Government in 2017-2021 is seen from: Independence Ratio, Efficiency Ratio Harmony Ratio (operational expenditure and capital expenditure). This research uses a quantitative descriptive analysis method which is a scientific and systematic research on the parts and phenomena and their relationships. Quantitative analysis is used to solve problems that are measuring quality in the form of (amount and number).

The results of the performance analysis show that the Tebo Regency Government's Bakeuda finances are seen from the Regional Financial Independence Ratio, the relationship pattern is still classified as an instructive relationship pattern because the average size of this ratio is 7.73%, The Regional Financial Efficiency Ratio can be said to be quite efficient because the average regional financial efficiency of Tebo Regency is 80.08%, The compatibility ratio is known that the average regional operational expenditure is still very high, namely 72.20% compared to the average capital expenditure of 25.90%, so it can be said Regional Government still pays little attention to regional development.

Keywords : Analysis of Regional Government Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Harmony Ratio

خلاصة

يعد قياس الأداء مهمًا جدًا لتقييم مدى جودة المنظمات والمديرين في المزيد من الخدمات العامة ، وليس فقط القدرة على إظهار أن الأموال العامة قد تم إنفاقها ، ولكنها تتضمن القدرة على إظهار أن الأموال قد استخدمت بشكل عادل ، من أجل رفاهية المجتمع يهدف هذا البحث إلى تحليل كيفية رؤية الأداء المالي لباكودا لحكومة تيبو ريجنسي في 2017-2021 من: نسبة الاستقلال ، ونسبة الكفاءة ، ونسبة الانسجام (الإنفاق التشغيلي والنفقات الرأسمالية). البحث المنهجي على الأجزاء والظواهر وعلاقتها. يستخدم التحليل الكمي لحل المشكلات التي تقيس الجودة على شكل (الكمية والعدد). تظهر نتائج تحليل الأداء أن الموارد المالية لباكودا لحكومة تيبو ريجنسي تُرى من نسبة الاستقلال المالي الإقليمي ، ولا يزال نمط العلاقة مصنعًا كمنط علاقة إرشادي لأن متوسط حجم هذه النسبة هو 7.73٪. يمكن القول أن نسبة الكفاءة المالية الإقليمية فعالة للغاية لأن متوسط الكفاءة المالية الإقليمية يبلغ 80.08٪. ومن المعروف أن نسبة التوافق لا تزال مرتفعة جدًا ، **Tebo Regency** لشركة أي 72.20٪ مقارنةً بـ متوسط الإنفاق الرأسمالي 25.90٪ بحيث يمكن القول إن الحكومة الإقليمية لا تزال تولي القليل من الاهتمام للتنمية الإقليمية

الكلمات الرئيسية: تحليل الأداء المالي للحكومة الإقليمية ، ونسبة الاستقلال المالي الإقليمي ، ونسبة الكفاءة المالية الإقليمية ، ونسبة الانسجام.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *Alhamdulillahirobbil alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah membawa berkat dan rahmat hidayahnya, yang mana untuk penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan, kesabaran dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021”** Shalawat serta salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umat sepanjang zaman, Amin ya rabbal alamin.

Kemudian tujuan dibuatnya skripsi ini agar memenuhi sebahagian syarat memperoleh Gelar sarjana Ekonomi (SE) bagi mahasiswa program S1 program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikan skripsi ini tidak akan terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusun skripsi ini hingga selesai terutama kepada yang terhormat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr.A.A Miftah,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
3. Dr. Elyanti Rosmanidar S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1, Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si.,Ph.D, Selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Addiarrahman, S.H.I.,M.S.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Efni Anita, SE., M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Sucipto, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Prof. Dr. As'ad Isma, M.Pd pembimbing I Skripsi ini.
7. Bapak Fauzan Ramli, SE.,ME selaku pembimbing II Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.

Kemudian akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 8 April 2023

Penulis

Miftakur Rohmad
504190049

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR | i |
| NOTA DINAS..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 8 |
| C. Batasan Masalah..... | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 9 |
| F. Manfaat Penelitian | 9 |
| G. Sistematis Penulisan..... | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS | |
| A. Landasan Teori..... | 11 |
| 1. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah | 11 |
| 2. Analisis Kinerja Keuangan | 12 |
| 3. Indikator Kinerja Keuangan Daerah..... | 13 |
| 4. Ruang Lingkup Keuangan Daerah | 16 |
| 5. Pengelolaan Keuangan Daerah..... | 17 |
| 6. Perspektif Keuangan Islam..... | 18 |
| 7. Maqashid Syariah Dalam Keuangan Islam | 22 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

| | |
|----------------------------|----|
| B. Studi Relevan | 24 |
| C. Kerangka Berpikir | 31 |
| D. Hipotesis | 32 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Metode dan Jenis Penelitian | 33 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 33 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 33 |
| D. Populasi dan Sampel | 34 |
| E. Metode Penarikan Sampel | 35 |
| F. Instrumen Penelitian | 35 |
| G. Defenisi Operasional Variabel | 36 |
| H. Metode Pengolahan dan Analisis Data | 37 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 38 |
| B. Hasil Penelitian | 49 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian | 53 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Implikasi | 61 |
| C. Saran | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 : PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo | 5 |
| Tabel 1.2 : Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tebo | 6 |
| Tabel 2.1 : Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah | 14 |
| Tabel 2.2 : Kategori Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah | 16 |
| Tabel 2.3 : Studi Relevan | 24 |
| Tabel 3.1 : Operasional Variabel | 36 |
| Tabel 4.1 : Nama Kecamatan Kabupaten Tebo | 39 |
| Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo | 42 |
| Tabel 4.3 : Tingkat Pendidikan yang Tamat Tahun 2021 | 44 |
| Tabel 4.4 : Rasio Kemandirian Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 | 50 |
| Tabel 4.5 : Rasio Efisiensi Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 | 51 |
| Tabel 4.6 : Rasio Keserasian (belanja operasi) Kabupaten Tebo 2017-2021 | 52 |
| Tabel 4.7 : Rasio Keserasian (belanja modal) Kabupaten Tebo 2017-2021 | 53 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunanraja
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunanraja

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran..... | 31 |
|--------------------------------------|----|

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengelolaan dana daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, merupakan aktivitas yang terukur dari suatu entitas dalam periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan perubahan pada pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kinerja merupakan aktivitas yang terukur dari suatu entitas dalam periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan suatu pekerjaan, Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara merupakan imbas sistem ekonomi yang dilaksanakan pada suatu lembaga keuangan serta dari perkembangan barang dan jasa yang diproduksi mengalami peningkatan. Cita-cita dari setiap daerah atau suatu negara tentunya berkeinginan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena gambaran dari tingginya pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan suatu daerah memiliki nilai positif dalam target keberhasilan dalam pembangunan. Keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan akan menjadi sumber peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Perkembangan lembaga keuangan Islam pada saat beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan, hal ini tentunya didukung oleh beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan yang begitu tinggi diantaranya adalah geografi, teknologi, budaya, ideologi, bahasa yang satu sama lain saling mendukung.²

Menurut Halim menjelaskan bahwa ciri-ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang

² Zainur Zainur, "Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (December 30, 2020): hlm 125.

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dan ketergantungan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Dan masih banyak potensi-potensi daerah yang sementara ataupun belum dikembangkan padahal itu juga merupakan sumber penghasilan daerah dan penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal dalam hal ini semua yang berkaitan dengan potensi daerah itu sendiri,³

Penyidikan dari kajian sebelumnya yang dilakukan Amin yang melakukan analisis pengelolaan keuangan keuangan daerah Tahun 2010-2014 hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis di era otonomi daerah berdasarkan analisis rasio keuangan adalah cukup baik. Dapat dikatakan cukup baik karena setiap tahun dapat mengoptimalkan kemampuan keuangannya walaupun hasil peratusnya masih dalam kategori rendah. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkalis karena memiliki rata-rata 18,76%,⁴

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah ,penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan suatu kebijakan atau ketentuan perundang undangan selama satu periode anggaran. Sedangkan Kinerja Keuangan adalah merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang

³ Daniel Frangky Sambow, "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 02 (April 12, 2016): hlm 191.

⁴ Nurul Amin, "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Iqtishaduna* 12, no. 01 (Juli 02, 2014): hlm 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai dengan ketentuan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan untuk sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja khususnya keuangan Pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Tebo, karena itu Pemerintah Kabupaten Tebo yang disertai menjalankan roda Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.⁵

Dalam Islam sendiri konsep anggaran negara bisa menggunakan konsep baitulmaal dengan sistem *balanced budget* atau sistem pengeluaran dan pemasukan yang seimbang. Pengaturan anggaran pemerintah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dilakukan secara cermat, efektif dan efisien sehingga meskipun dalam sering terjadi peperangan anggaran negara tetap stabil. Islam menekankan dalam pencapaian kesejahteraan yang bersumber pada pengelolaan keuangan harus secara optimal, Kebijakan negara dalam mencapai segala aspek tujuan kesejahteraan publik maupun non publik haruslah berjalan secara seimbang.⁶

⁵ Nurul Amin, "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Iqtishaduna* 15, no. 01 (Juni 18, 2014): hlm 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya. (Q.S.Al-Furqan :67).⁷

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan akhirat, juga harus mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pengelolaan aset daerah pada dasarnya adalah kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya dan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD dari daerahnya sendiri. Sehingga ciri utama daerah otonomi adalah terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan dari daerahnya sendiri, gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah memberikan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah laporan keuangan, maka kegiatan analisis ini menggunakan teknik atau cara tertentu yang benar agar kegiatan analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menilai kinerja keuangan.

Pada penelitian Wenny dalam menyelidikannya menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap prestasi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Bandung: PT . Syaamil Cipta Media, 2005).hlm 365

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tebo, 2019-2021
Jenis Penerimaan (ribu rupiah)

| No | Jenis Penerimaan | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Pajak daerah | 26.218.319 | 19.173.168 | 17.649.500 |
| 2. | Retribusi daerah | 3.226.061 | 3.017.427 | 4.658.000 |
| 3. | Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 6.680.580 | 8.221.154 | 7.000.000 |
| 4. | Lain-lain PAD yang sah | 47.071.413 | 48.047.676 | 47.817.968 |
| | Pendapatan Asli Daerah | 83.236.373 | 78.459.425 | 77.125.468 |
| | Realisasi Pendapatan Daerah | 1.157.280.008 | 1.085.601.955 | 1.038.176.777 |
| | Dana Perimbangan | 842.319.739 | 756.063.831 | 748.172.145 |
| 1. | Bagi Hasil Pajak | 31.877.536 | 23.471.010 | 31.877.536 |
| 2. | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 56.981.825 | 58.629.557 | 58.838.592 |
| 3. | Dana Alokasi Umum | 598.297.279 | 534.449.531 | 546.836.312 |
| 4. | Dana Alokasi Khusus | 598.297.279 | 139.513.733 | 110.619.705 |
| 5. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 231.723.896 | 251.078.699 | 212.879.164 |
| | Jumlah/Total | 1.229.105.247 | 1.158.200.271 | 1.108.176.777 |

Sumber: bps.go.id

Dilihat dari tabel data diatas bahwa PAD Kabupaten Tebo dari tahun 2019 sebesar Rp. 83.236.373 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 78.459.425, dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 sebesar Rp. 77.125.468. Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tebo dalam tiga tahun terakhir mengalami selalu penurunan , ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo masih memerlukan bantuan besar dari pemerintahan pusat dan ini menunjukkan bahwa kabupaten tebo belum cukup mandiri dalam menetapkan penerimaan daerah. Komponen PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

⁸ Weny, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan".: *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. 1, no.03 (Maret 18, 2012) hlm 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah merupakan komponen yang memiliki pengaruh terbesar terhadap penerimaan pendapatan PAD di Kabupaten Tebo. Semakin banyak pajak dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun, dengan harapan dapat menjadikan warganya lebih sejahtera. Bagi warga Kabupaten Tebo sebagai pembayar pajak, sesungguhnya pajak itu bukanlah beban, namun tanggung jawab alamiah.

Tabel 1.2
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tebo, 2019-2021
Jenis Pengeluaran (ribu rupiah)

| No | Jenis Pengeluaran | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A. | Belanja Tidak Langsung | 593.653.672 | 729.752.701 | 731.211.892 |
| 1. | Belanja Pegawai | 396.705.632 | 410.736.731 | 445.282.212 |
| 2. | Belanja Bunga | - | - | - |
| 3. | Belanja Subsidi | 4.309.236 | 3.510.000 | 1.70.514 |
| 4. | Belanja Hibah | 7.039.780 | 7.427.600 | 73.386.982 |
| 5. | Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| 6. | Belanja Bagi Hasil | 2.063.964 | 2.143.900 | 2.211.900 |
| 7. | Belanja Keuangan | 182.519.046 | 187.240.069 | 177.260.284 |
| 8. | Biaya Tidak Terduga | 1.016.014 | 118.649.401 | 5.000.000 |
| B. | Belanja Langsung | 526.181.902 | 347.816.458 | 399.464.885 |
| 1. | Belanja Pegawai | 45.374.582 | 50.815.476 | - |
| 2. | Belanja Barang Jasa | 211.713.629 | 201.263.040 | 250.062.720 |
| 3. | Belanja Modal | 269.093.691 | 95.737.942 | 149.402.165 |
| | Total | 1.229.105.247 | 1.158.200.271 | 1.108.176.777 |

Sumber: bps.go.id

Dilihat dari tabel diatas pengeluaran belanja tidak langsung kabupaten tebo menunjukkan di tahun 2019 sebesar Rp. 593.653.672 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 729.752.701 Dan terus mengalami kenaikan pengeluaran belanja tidak langsung sampai tahun 2021 sebesar Rp. 731.211.892, tabel diatas cukup membuktikan bahwa pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tebo lebih besar dari pada pendapatan asli daerah (PAD) masih belum adanya skala prioritas pembangunan dalam penyusunan anggaran, serta sistem pengeluaran yang belum efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan data yang dalam tabel diatas , maka dapat diketahui adanya beberapa masalah dalam bidang keuangan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yaitu:

1. Kurangnya kemampuan daerah dalam mencari sumber asli daerah seperti yang tercermin dalam tabel pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah.
2. Kurang efisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah, dimana masih sebagian besar anggaran belanja daerah digunakan untuk keperluan pegawai dan masih sedikit yang dialokasikan untuk belanja modal.

Pengembangan potensi wilayah Kabupaten Tebo tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral provinsi jambi, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya serta sosial ekonomi masyarakat menekankan pengembangan pembangunan pada pertanian, industri, perdagangan dan jasa. dalam pengetahuan , keterampilan dan kemampuan dalam mengolah keuangan yang baik saat merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan appraisal manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi. daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadap pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. Oleh karna itu dimana teknologi dan peradaban sudah semakin maju, menuntut sumber daya manusia yang kompeten yang semangat dan disiplin.⁹

Maka Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian,pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melakukan Pemerintahan baik dan bertanggung jawab terhadap

⁹ Agung Prihantoro, “Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen,” *Jurnal. unimus* 8 (November 2012): hlm 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pengelolaan keuangan sehingga tercipta Pemerintahan yang baik, maka Pemerintah daerah harus pandai mengatur dan mengelola laporan keuangannya dengan jelas tanpa ada ketidakpastian dalam mengelola laporan keuangan dan menyelenggarakan Pemerintahan sehingga dapat tercipta tata kelola keuangan Pemerintah yang baik serta adanya evaluasi laporan keuangannya yang berkala atas peningkatan daerah, sehingga dapat dinilai apakah meningkat atau menurunnya Pemerintahan Daerah tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut penulis ingin menjadi tertarik membuat penelitian dengan menggunakan judul yaitu **“Analisis kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021”**. Judul ini diambil karena peneliti menganggap bahwa masih ada permasalahan-permasalahan pada pemerintahan daerah perihal tentang laporan keuangan yang masih belum terungkap dalam penelitian ini. Lokasi kabupaten tebo diambil sebab beberapa masalah yang ingin diteliti ada dilokasi tersebut, kemudian tempat lokasi mudah dijangkau peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi yang ada disana.

B. Identifikasi Masalah

Dalam menganalisis suatu laporan keuangan daerah dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan keuangan daerah yang tentunya dihadapi Pemerintah Daerah yang berkaitan, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah. Pada Penelitian ini permasalahan yang ada yaitu seberapa besar tingkat Kemandirian, tingkat Efisiensi Keuangan Daerah, dan tingkat Keserasian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mengarah, maka peneliti membatasi permasalahan pada penelitian hanya terfokus pada pokok permasalahan dengan bertujuan tidak menyimpang dari penelitian mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



D. Rumusan Masalah

Dari masalah latar belakang diatas peneliti merumuskan bahwa perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Tebo dalam mengelola dan mengurus sendiri program, kegiatan, serta pelayanan pada masyarakat, dilihat dari Rasio Kemandirian?
2. Bagaimana kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Tebo dalam memaksimalkan belanja operasionalnya, dilihat dari Rasio Keserasian?
3. Bagaimana kinerja kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengeluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, dilihat dari Rasio Efisiensi?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang diatas tujuan penelitian ini untuk memberikan penilaian terhadap kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis peneliti ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang menganalisis laporan keuangan dan menilai kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Tebo.
2. Secara praktis
 - a. Bagi keuangan daerah penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi daerah Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya dalam menangani laporan keuangan dan menilai kinerja.
 - b. Bagi lembaga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang baik tentang analisis laporan keuangan agar dapat menilai kinerja keuangan serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan manajemen keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana menganalisis laporan keuangan agar dapat menilai kinerja keuangan.

C. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan suatu laporan yang jelas yang baik dan jelas tentang penelitian maka dilakukanlah sistematika penulisan yang membahas tentang isi pada penelitian di setiap babnya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Isi pada bab ini antara lain tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

Isi pada bab ini antara lain tentang kajian pustaka, studi relevan, kerangka pemikiran, definisi operasional variabel, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Isi pada bab ini tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode penarikan sampel, dan metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Isi pada bab ini tentang pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V : Penutup

Isi pada bab ini tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi



BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari berbagai pengertian tersebut, kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Bila diuraikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja).¹⁰

Kinerja keuangan juga sebagai untuk menilai suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang akan berlanjut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat. Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan pusat pertanggungjawaban

¹⁰ Mulia Andirfa, *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm 9.

¹¹ Sudaryo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, 1st ed. (Yogyakarta: ANDI(Anggota IKAPI), 2017), hlm 9.

yang di pimpin oleh seorang kepala satuan kerja dan bertanggungjawab atas entitasnya misalnya: dinas kesehatan, dinas kependudukan, dan catatan sipil, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olah raga dan lainnya.¹²

Maka dalam menilai kinerja dilakukan untuk menjadi tolak ukur dalam upaya meningkatkan kinerja, diantaranya kinerja keuangan pemda pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja keuangan pemda sangatlah penting, yang bertujuan membantu pemda untuk menilai capaian suatu strategi atau untuk evaluasi suatu program kegiatan.

Menurut Mardiasmo Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

- a) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah
- b) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.¹³

b. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan dibutuhkan menganalisa laporan keuangan. Pada saat melakukan analisis laporan keuangan harus dilakukan secara efektif sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Terhadap beberapa hal yang harus diamati pada saat melakukan analisis laporan keuangan.¹⁴

Pada saat menganalisis laporan keuangan sering dilakukan dengan membandingkan komponen antar laporan keuangan. Dengan demikian , hubungan antar laporan keuangan. Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah laporan keuangan, maka kegiatan analisis ini

¹² Mulia Andirfa, *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm 10.

¹³ Akhmad Yani and Zulkarnain Zulkarnain, "Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pontianak," *Widya Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (July 30, 2020): hlm 20.

¹⁴ Rosanna Purba, *Analisis Laporan Keuangan* (Sumatra Barat: PT Eksekutif Teknologi, 2023), hlm 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



membutuhkan Teknik atau cara tertentu yang tepat supaya kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan.¹⁵

c. Analisis Kinerja Keuangan daerah

Untuk menganalisis kinerja keuangan dibutuhkan laporan yang memuat informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Maka dalam laporan keuangan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya, dalam laporan keuangan. rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan.¹⁶

a) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan, semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

¹⁵ Rosanna Purba, *Analisis Laporan Keuangan* (Sumatra Barat: PT Eksekutif Teknologi, 2023), hlm 9.

¹⁶ Anis Karlina and Nur Handayani, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (2017): hlm 917.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Berikut adalah tabel dan rumus kategori tingkat ketergantungan keuangan daerah.¹⁷

$$\text{Rumus rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Sangat rendah | 0%-25% | Instruktif |
| Rendah | >25%-50% | Konsultatif |
| Sedang | >50%-75% | Partisipatif |
| Tinggi | >75%-100% | Delegatif |

Sumber : Mahmudi (2019:141)

Keterangan pola hubungan rasio kemandirian:

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada.

b) Rasio Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal

¹⁷ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 4th ed. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), hlm 140.

secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Menurut Mahmudi, Rasio belanja operasional merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja Operasi. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut. Pada umumnya proporsi belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.¹⁸

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%.¹⁹

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

c) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai

¹⁸ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 4th ed. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), hlm 140.

¹⁹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 4th ed. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), hlm 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kurang dari satu atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Berikut adalah tabel dan rumus menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Berikut.²⁰

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Efisiensi Kinerja Keuangan

| Kriteria Efisiensi | Persentase Efisiensi (%) |
|--------------------|--------------------------|
| 100% Keatas | Tidak Efisien |
| 90%-100% | Kurang Efisien |
| 80%-90% | Cukup Efisien |
| 60%-80% | Efisien |
| Kurang dari 60% | Sangat Efisien |

Sumber: Mahmudi (2019:142)

d. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana dalam PP Nomor 58 Tahun 58 Tahun 2005 antara lain kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah, kemudian kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga. Pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Keuangan daerah merupakan hak semua dan kewajiban daerah dalam rangka melaksanakan pemerintah daerah agar dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

²⁰ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 4th ed. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), hlm 141.

daerah tersebut. Pengolahan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penataan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan dalam pemerintah daerah.²¹

Pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab daerah, dibantu dari dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewajiban pemerintah, didukung dana dari dan beban anggaran pendapatan pengeluaran negara. Penyelenggara keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan mengolah keuangan daerah. Untuk melakukan tanggung jawab tersebut, kepala pemerintah memberikan sebagian tanggung jawabnya berupa perencanaan, penataan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, untuk pengawas keuangan daerah kepada para perangkat daerah. Pelimpahan tanggung jawab untuk perangkat daerah ini berdasarkan atas kewenangan antara yang memerintah setiap daerah. Hal penting lainnya untuk pemerintahan daerah adalah perihal keuangan. Keuangan dianggap dapat memperlancar suatu pembangunan atau kebijakan yang direncanakan oleh pemimpin daerah. Oleh karena itu, hendaknya keuangan dapat diperoleh dengan jelas sesuai aliran keuangannya. Keuangan daerah dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber dana perimbangan dan dana pendapatan lainnya yang sah.²²

e. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dan akuntabel.²³

²¹ Khusaini, *Keuangan Daerah* (Malang: UB Press, 2018), hlm 3.

²² Lailul Mursyidah and Ilmi Usrotin Choiriyah, *Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah* (Umsida Press, 2020), hlm 130.

²³ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 4th ed. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), hlm 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Kejelasan mengenai misi pengelolaan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan.²⁴

Kegiatan pengelolaan daerah keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan pengelolaan meliputi yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasannya dan pertanggungjawaban. dilakukan dengan menggunakan manajemen keuangan daerah untuk mengelola keuangan daerah disebut tata usaha daerah. Tata usaha daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan, tata usaha umum terkait dengan urusan surat menyurat dan administrasi lainnya, sedangkan tata usaha keuangan daerah terkait dengan tata buku yang merupakan kegiatan sistematis di bidang keuangan prinsip, standar, dan prosedur tertentu agar mendapatkan informasi yang jelas di bidang keuangan khususnya pada laporan keuangan daerah.²⁵

f. Perspektif Keuangan Islam

Keuangan menurut perspektif Islam adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Karena itu, syariah lebih dari sekadar perangkat aturan-aturan hukum. Sejatinnya syariah mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah tunduk pada keadilan di bawah hukum. Ruang lingkup keuangan islam terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan uang atau dan, hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah.

Seperti dalam perintah Allah pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 254 dan Surat Al-Dzariyat Ayat 19.

²⁴ Hendara Karianga, *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 10.

²⁵ Hendara Karianga, *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Bunyi Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 254 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim” (Q.S. Al-Baqarah/2:254).*²⁶

Bunyi Al-Qur'an dalam Surat Adh-Dhariyat Ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

*“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta” (Q.S. Adh-Dhariyat /51:19).*²⁷

Kedua surat Al-Qur'an tersebut menunjukkan dalam penggunaan dana harus hati-hati dan tidak melanggar larangan Allah. Surat Adh-Dzariyat ayat 19 juga memberikan anjuran bahwa harta kita sebagian menjadi hak untuk orang yang fakir dan miskin. Hal ini yang menjadi pembeda antara keuangan konvensional dengan keuangan syariah.

Larangan adanya riba sangat keras, prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an mengajarkan sebagai berikut.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Bandung: PT . Syaamil Cipta Media, 2005).hlm 24

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Bandung: PT . Syaamil Cipta Media, 2005).hlm 521

- 1) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridho di antara kedua belah pihak, dilarang ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi.
- 2) Menegakkan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, dan pembagian keuntungan.
- 3) Larangan mengenakan riba.
- 4) Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan persaudaraan.
- 5) Tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan.
- 6) Menghindari praktik spekulasi, gharar, tadelis, dan mayir.²⁸

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Prinsip Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang meliputi seluruh aspek kegiatan ekonomi. seperti produksi, konsumsi, distribusi dan pertukaran. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi pada sedikit orang dan menjamin sirkulasinya didalam masyarakat.²⁹

Dijelaskan juga dalam sebuah hadits bahwa kita harus lebih baik memakan sesuatu ataupun memberi makan kepada keluarga dengan hasil jerih payah kita sendiri didalam bekerja. Bukan dari yang lain yang tidak jelas perolehannya. Sebagaimana hadits tentang Anjuran untuk memakan suatu yang halal dan baik.

انَّ الْحَالَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم)

²⁹Maula Nasrifah, "Sistem Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an & Hadits" *Jurnal Asy-Syari'ah* 5, no.2 (Juni 12, 2019): hlm 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya:

“Halal itu jelas, haram juga jelas, diantara keduanya adalah syubhat, tidak banyak manusia yang mengetahui. Barang siapa yang menjaga diri dari subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya, barang siapa yang terjerumus kedalam subhat, maka ia diibaratkan pengembala sekitar tanah yang dilarang yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi larangan. Larangan Allah adalah hal yang diharamkan oleh Allah SWT, ingatlah bahwa didalam jasad terdapat segumpal daging, jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya, ingatlah daging itu adalah hati” (HR. Bukhori)³⁰

Hadist menjelaskan bahwa mencari makan atau memberi makan itu mudah. Namun yang dianjurkan oleh Islam adalah bagaimana memakan atau memberi makan barang yang sudah jelas kehalalannya. Jangan memakan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya.

Manajemen keuangan islam adalah kegiatan yang berhubungan dengan uang dan suatu aktivitas yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah. Selain dalam manajemen keuangan Islam berupa upaya perolehan dana atau investasi. Maka tentang aktivitas penggunaan dana, dalam hal ini sebaiknya harta yang diperoleh digunakan untuk hal hal yang tidak dilarang dalam Islam, seperti membeli barang-barang kebutuhan pokok, barang konsumtif, dan sebagainya.³¹

Prinsip belanja pemerintah dalam islam menurut an-Nabhani dan Al-Maliki, dalam pengambilan kebijakan fiskal yang sesuai dengan ekonomi islam adalah setiap kebijakan haruslah memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder sesuai dengan kadar kemampuan individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian titik berat sasaran pemecahan permasalahan dalam ekonomi Islam terletak pada

³⁰Maula Nasrifah, “Sistem Ekonomi Islam Dalam Al-Qur’an & Hadits” *Jurnal Asy-Syari’ah* 5, no.2 (Juni 12 ,2019): hlm 16.

permasalahan individu manusia bukan tingkat kolektif (negara dan masyarakat).³²

g. Maqashid syariah dalam keuangan islam

Maqashid al-shariah adalah dua makna kata yang terdiri atas maqashid dan al-shariah. Maqashid adalah bentuk jamak (plural) dari kata maqsid yang berarti tempat yang mengarah atau dimaksudkan atau maqṣad yang berarti kesengajaan atau tujuan. Jika kata dari maqashid dan al-shariah ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan maqashid al-shariah dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut maqashid al-shariah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.³³

Kemudian dalam penerapannya dalam konteks keuangan syariah *maqashid syariah* memiliki beberapa konteks dalam ekonomi yaitu peran ganda sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Agar memberikan landasan filosofi yang rasional dari aktivitas ekonomi. Maka peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian pada masa yang selalu disesuaikan dengan teori-teori ekonomi dan *maqashid syariah*. *Maqashid syari'ah* dalam perspektif ekonomi Islam dipahami dengan pembangunan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan tersebut harus terlihat dalam indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, kesehatan dan keserasian lingkungan sosial dengan norma-norma dan nilai-nilai Islam. Penentuan anggaran belanja pemerintah atau negara dalam perspektif *maqashid syari'ah* disesuaikan dengan lima hirarki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan terlindungi diantaranya: perlindungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



³² Firman Muhammad Arif, "Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqashid al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (July 20, 2019): hlm 11

³³ Abdul Helim, *Maqosid Al-Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm

terhadap Agama (*Hifdzul ad-Din*) perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdzul an-nafs*) perlindungan terhadap Akal (*Hifdzul al-Aql*) perlindungan terhadap Keturunan (*Hifdzul an-Nasl*) perlindungan terhadap Harta (*Hifdzul al-Mal*). *maqasid syariah* sebagai alat ukur untuk melihat tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Daerah (APBD).³⁴

Dalam tujuan *maqashid syariah* salah satunya ialah keadilan dalam islam untuk mengupayakan kesejahteraan bersama agar memiliki kedudukan yang sama. Kemudian dalam meningkatkan martabat bagi mereka yang berbuat adil dan melarang bagi mereka yang menentang tindakan keadilan serta keadilan juga merupakan kebaikan yang bisa menjadikan pelakunya dekat dengan ketakwaan karena keadilan merupakan investasi dari ketakwaan.

Sebagaimana juga dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha melihat.*” (Q.S. An-Nisa’/58:176)³⁵

Maka keadilan dalam hukum tidak akan membedakan siapapun orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik ia kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat biasa, berpendidikan atau tidak, dan tidak pula perbedaan warna kulit atau perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapan hukum semuanya adalah sama. Konsep persamaan ini tidaklah membandingkan

³⁴ Abdul Helim, *Maqosid Al-Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahnya* (Bandung: PT . Syaamil Cipta Media, 2005).hlm 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



adanya pengakuan tentang kelebihan, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya, akan tetapi kelebihan itu tidak boleh membawa pada perbedaan perlakuan atau penerapan hukum pada dirinya.

B. Studi Relevan

Untuk menjauhi atau menghindari terjadinya duplikasi dari sebuah penelitian dan pengulangan pembahasan, maka harus dilakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penulisan ini, antara lain :

Tabel 2.3
Studi Relevan

| No | Nama / Tahun | Judul | Metode | Kesimpulan | Perbedaan |
|----|---|---|------------|---|--|
| 1 | Ai Siti Farida dan Raden Faisal Maulana Nugraha /2019 | Analisis laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten subang | Kualitatif | Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Subang pada tahun 2014-2017 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan rendah sekali. Selain itu, kinerja keuangan | Perbedaannya adalah dalam penelitian Ai Siti Farida dan Faisal Maulana Nugraha adalah dari segi metode penelitian kualitatif dan pada penelitian penulis menggunakan metode kuantitatif unsur <i>Maqasid al-shariah</i> pada penelitian ini. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2014-2017 jika dilihat berdasarkan rasio keserasian belanja modal dengan belanja operasional dapat dikatakan pemerintah Kabupaten Subang lebih cenderung mengutamakan belanja operasional dari pada belanja modal. Kemudian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2014-2017 berdasarkan rasio pertumbuhan keuangan daerah dapat dikatakan masih sangat rendah. Selanjutnya kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Subang pada</p> |
|--|--|--|--|--|

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftho Jambi

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|
| | | | | tahun 2014-2017 berdasarkan rasio efisiensi PAD dapat dikatakan tidak efisien. ³⁶ | |
| | Ifrita Indah Sari dan Imawati Yousida/2019 | Analisis Laporan Keuangan Daerah terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten tanah bumbu. | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu baik. Hal ini menunjukkan dengan rata-rata derajat desentralisasi rendah, rasio ketergantungan daerah sangat tinggi, rasio kemandirian daerah masih rendah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah sudah efektif, rasio efisiensi pendapatan asli daerah efisien, rasio pertumbuhan pendapatan baik, rasio keserasian terhadap | Perbedaannya adalah dalam penelitian Ifrita Indah dan Imawati Yousida adalah dari metode analisis rasio, penelitian penulis hanya menggunakan analisis rasio, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi dan rasio kemandirian penelitian ini tidak menggunakan unsur maqhashid syariah pada penelitian ini. |

³⁶ Ai Siti Farida and Raden Faisal Maulana Nugraha, "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 2 (December 10, 2019).

| | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|---|--|
| | | | | alokasi dana lebih mendominasi belanja operasi dari pada belanja modal. Debt service coverage ratio (DSCR) baik. ³⁷ | |
| 3 | David Al Fakrizky/2018 | Analisis laporan keuangan sektor publik untuk Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2018) | Kuantitatif deskriptif | Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya dilihat dari: (1) rasio pertumbuhan pendapatan dapat dikategorikan baik karena rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,03% (2) rasio pertumbuhan belanja dapat dikategorikan baik karena rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,72% (3) derajat desentralisasi dapat dikategorikan baik karena | Perbedaannya adalah dalam penelitian David Al Fakrizky adalah dari metode analisis rasio, penelitian penulis hanya menggunakan analisis rasio kemandirian, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi dan penelitian ini tidak menggunakan unsur maqashid syariah pada penelitian ini. |

³⁷ Ifrita Indah Sari and Imawati Yousida, "Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 5, no. 1 (March 19, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>rata-rata pertumbuhannya sebesar 38,10% (4) rasio ketergantungan daerah dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 24,15% (5) rasio kemandirian daerah dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 157,73% (6) rasio efektivitas PAD dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 106,69% (7) rasio efektivitas pajak dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 104,71% (8) pertumbuhan aset dikategorikan kurang baik karena pertumbuhannya hanya sebesar 4,46% (9) rasio lancar</p> | |
|--|--|--|--|--|--|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|--|---|
| | | | | dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 446,00% (10) rasio kas dikategorikan baik karena pertumbuhannya ³⁸ | |
| 4 | Heri Faisal Harapan/2020 | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah | Kuantitatif | Berdasarkan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah, ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan. ³⁹ | Perbedaannya adalah dalam penelitian Heri Faisal Harapan adalah dari metode analisis rasio, penelitian penulis hanya menggunakan analisis rasio pertumbuhan, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi dan penelitian ini tidak menggunakan unsur syariah pada penelitian ini. |
| 5 | Wiwik Andriani, Desi Handayani, Roni Putra, | Perancangan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah | Kuantitatif | Berdasarkan rasio derajat desentralisasi kinerja keuangan | Perbedaannya adalah dalam penelitian Wiwik Andriani dan Desi Handayani adalah |

³⁸ David Al Farizky, "Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2018)" (2018):.

³⁹ Heri Faisal Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (March 19, 2020).

| | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|
| dan Dini Marisa/2021 | h Daerah Dengan EFA (Excel For Accounting) | | Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi. rasio ketergantungan keuangan daerah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar kecenderungan kondisi keuangan untuk empat tahun terakhir sangat tinggi dengan presentasi mencapai angka rata- rata 75,12%. dilihat dari rasio kemandirian termasuk dalam kategori masih kurang dengan pola hubungan instruktif maksudnya peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini | dari metode analisis rasio, penelitian penulis hanya menggunakan analisis rasio kemandirian, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi dan penelitian ini tidak menggunakan unsur maqshohid syariah pada penelitian ini. |
|-------------------------|---|--|---|---|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

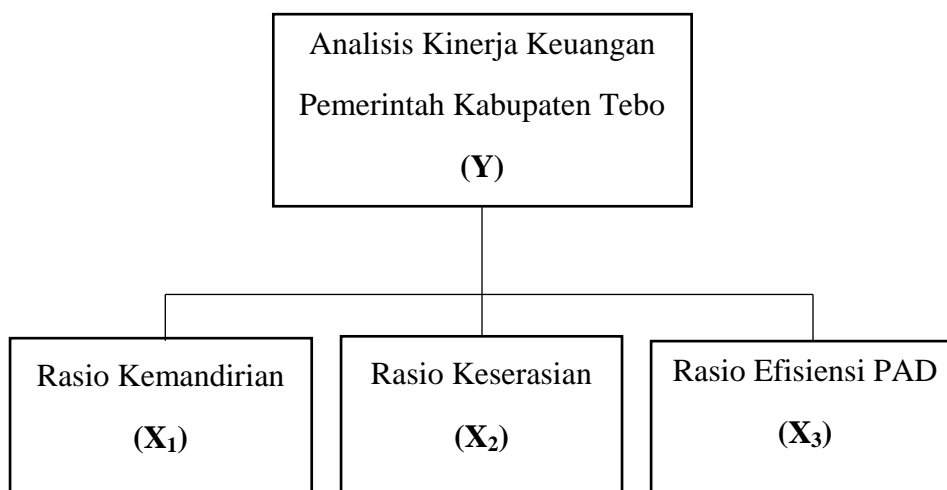
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. ⁴⁰ | |
|--|--|--|---|--|

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3

Kerangka Konsep Penelitian



Pada gambar diatas dapat dilihat hubungan antara X_1 , X_2 , X_3 dengan Y analisis laporan keuangan, yaitu untuk melakukan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi. analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur Kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

⁴⁰ Wiwik Andriani et al., "Perancangan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan EFA (Excel For Accounting)," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* (Juni, 12 2021).

Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.⁴¹

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴²

Hipotesis adalah gambaran atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- H_0 : Diduga laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Tebo dari tahun 2017-2021 tidak berjalan dengan baik berdasarkan rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal), dan rasio efisiensi keuangan daerah
- H_a : Diduga laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Tebo tahun dari 2017-2021 berjalan dengan baik berdasarkan rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal), dan rasio efisiensi keuangan daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

⁴¹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 4th ed. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), hlm 6.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu mengumpulkan data, mengolah dan menginterpretasikan data yang memperoleh sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti berdasarkan angka-angka. penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan, atau menggabungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berupa laporan keuangan pemerintah daerah dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan.⁴³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan wilayah Kabupaten Tebo dikantor BAKEUDA yang berlokasi di : Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jl. Lintas Tebo – Bungo Km.12, Muara Tebo.

b. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2022.

C. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dimana metode sumber data dengan mengumpulkannya dengan data sekunder.

⁴³ Andriani et al., "Perancangan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan EFA" *Jurnal .pcr.ac.id* 14.no. 01(Mei 18, 2021), hlm 156.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dan BPS (Badan Pusat Statistik) kemudian melihat data sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan penelitian, data sekunder adalah data-data yang bersumber dari arsip-arsip atau dokumen penting Negara dan literature-literature pustaka lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tebo.

D. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁴

Pada penelitian ini, dan populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan daerah yang dapat memberikan informasi data keuangan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah, yang kemudian akan diteliti lebih lanjut.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.⁴⁵

Karena terdapat banyak Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia, maka peneliti memusatkan penelitian ini dengan menggunakan laporan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 80.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



keuangan yang diambil dari penulis yaitu sampel selama lima tahun terakhir (2017-2021).

E Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.⁴⁶

Berdasarkan pengertian diatas, adapun kriteria yang dijadikan acuan sebagai penarikan sampel adalah dengan cara mengcopy file laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun (2017-2021) dan profil kantor badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, selain teknik dokumen, penulis juga menggunakan studi perpustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber perpustakaan yang mendukung dengan penelitian ini.

E Instrumen Penelitian

Menurut Purwanto instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian, diartikan juga sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.⁴⁷

Instrumen yang digunakan penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan dan melakukan pengamatan mendokumentasikan dari BPS (Badan Pusat Statistik) data

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 85.

⁴⁷ Purwanto, *Penyusunan Instrumen*, 1st ed. (Magelang: StaiaPress, 2018), hlm 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Pada Tahun 2017-2021, agar dapat mendapatkan informasi mengenai rasio kemandirian, rasio keserasian belanja dan rasio efisiensi.

C Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

| Variabel | Definisi | Indikator |
|---|---|--|
| Analisis kinerja keuangan daerah dalam mengukur kinerja | Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan | 1. Rasio Kemandirian 2. Rasio Keserasian a. Belanja Operasi b. Belanja Modal 3. Rasio Efisiensi Keuangan |

a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan.

b. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keseharian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

rasio ini merupakan rasio yang mencerminkan hubungan diantara jumlah yang dihasilkan untuk mendapatkan penghasilan dan ketercapaian penghasilan yang diperoleh. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.

H. Metode Pengolahan Data

Dari data yang dikumpulkan kemudian peneliti melakukan pengelolaan dan analisis data untuk mengungkapkan fenomena mengenai kinerja keuangan dengan mengelola data keuangan yang telah didapat sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dihitung berdasarkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Keserasian:

Belanja operasional dihitung berdasarkan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{a) Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belanja modal dihitung berdasarkan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{b) Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya Pemerintah Daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

a. Letak Geografi Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo adalah salah satu wilayah Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil dari pemekaran dari kabupaten Bungo Tebo, pada tanggal 12 Oktober 1999. Pada saat itu Kabupaten Tebo merupakan bagian dari Kabupaten Bungo Tebo, sebuah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Merangin. Sejarah Kabupaten Tebo pada saat itu dimulai dari surat Gubernur kepala daerah (KDH) tingkat jambi nomor 135/2465/ tahun 1999 tentang program rencana pemekaran wilayah Kabupaten daerah tingkat II. Surat ini ditindak lanjuti oleh Bupati Bungo Tebo.

Maka dilihat secara geografis Kabupaten Tebo terletak diantara 00 52' 32''-10 54'50'' lintang selatan dan antara 1010 48'57''-1020 49'17'' bujur timur. Kalau dilihat dari posisinya, Kabupaten Tebo berada dibagian barat laut Provinsi Jambi dan secara administratif berbatasan dengan wilayah yaitu:

1. Sebelah utara : Kabupaten Indragiri Hilir (Provinsi Riau)
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Tabir (Kabupaten Merangin)
3. Sebelah Timur : Kecamatan Tungkal Ulu (Kabupaten Batanghari) Jujuhan, Tanah Sepenggal, Muara Bungo (Kabupaten Bungo).

Pada lokasi Kabupaten Tebo berdekatan dengan Kabupaten Bungo, yang menjadi pusat Pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi dan pusat pemukiman disana juga berdekatan dengan jalur trans Sumatera sehingga memiliki hubungan yang terbuka dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera sehingga dengan demikian bisa dikatakan Kabupaten Tebo ini adalah posisi yang sangat strategis dari sudut pengembangan wilayah. Dilihat untuk luas wilayah Kabupaten Tebo secara administratif yaitu 6.461 km², terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 107 desa dan 5 Kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Tabel 4.1
Nama Kecamatan, Nama Ibu Kecamatan, Luas Wilayah
Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Tebo

| No | Kecamatan | Nama Ibu Kota | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
|--------|----------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 1. | Tebo Tengah | Muara Ibu Kota | 983,5 | 2 | 10 |
| 2. | Tebo Ilir | Sungai Bengkal | 708,7 | 1 | 10 |
| 3. | Sumay | Teluk Singkawang | 1.26 | - | 12 |
| 4. | Tebo Ulu | Pulau Temiang | 410,3 | 1 | 16 |
| 5. | VII Koto | Sungai Abang | 658,7 | - | 10 |
| 6. | Rimbo Bujang | Wirotho Agung | 406,9 | 1 | 7 |
| 7. | Rimbo Ilir | Karangdadi | 214,3 | - | 9 |
| 8. | Rimbo Ulu | Sukadamai | 295,7 | - | 6 |
| 9. | Tengah Ilir | Mangupeh | 221,4 | - | 5 |
| 10. | VII Koto Ilir | Balai Rajo | 468,2 | - | 6 |
| 11. | Serai Serumpun | Sekutur Jaya | 315,7 | - | 8 |
| 12. | Muara Tabir | Pintas Tuo | 509,3 | - | 87 |
| Jumlah | | | 6.461 | 5 | 107 |

Sumber : BPS Tebo

Pada jarak Ibukota Kabupaten Tebo (Kecamatan Muara Tebo) dengan jarak Ibukota lain di Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut:

- Muara Tebo - Muara Bungo yaitu 45 km
- Muara Tebo - Sengeti yaitu 218 km
- Muara Tebo - Bangko yaitu 122 km
- Muara Tebo - Sarolangun yaitu 192 km
- Muara Tebo - Kota Jambi yaitu 208 km
- Muara Tebo - Muara Sabak yaitu 284 km
- Muara Tebo - Muara Bulian yaitu 144 km

- Muara Tebo - Sungai Penuh yaitu 286 km
- Muara Tebo - Kuala Tungkal yaitu 333 km

Kemudian pada jarak Ibukota Kabupaten Tebo (Kecamatan Muara Tebo) dengan jarak Ibukota Kecamatan lainnya di Kabupaten Tebo, adalah sebagai berikut:

- Muara Tebo - Teluk Singkawang yaitu 17 Km
- Muara Tebo - Sungai Bengkal yaitu 53 Km
- Muara Tebo - Pulau Temiang yaitu 58 Km
- Muara Tebo - Wirotho Agung yaitu 78 Km
- Muara Tebo - Sungai Abang yaitu 92 Km
- Muara Tebo – Mengupeh yaitu 44 Km
- Muara Tebo - Suka Damai yaitu 50 Km
- Muara Tebo - Karang Dadi yaitu 15 Km
- Muara Tebo - Pinang Belai yaitu 50 Km
- Muara Tebo - Pintas Tuo yaitu 80 Km
- Muara Tebo - Balai Rajo yaitu 75 Km

Kemudian Pada perkotaan Muara Tebo yang merupakan Ibukota Kabupaten Tebo, dilihat dari secara fisik sudah merupakan salah satu kesatuan kawasan terbangun dengan perkotaan Tebing Tinggi. Peranan pada perkotaan Kabupaten Tebo sebagai pusat untuk melakukan kegiatan dan pelayanan pusat bagi daerah sekitarnya, sudah tidak dapat disaingkan dengan perkotaan lain. Begitu pula halnya dengan perkotaan di Wirotho Agung yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang, peranannya sangat begitu penting dalam perekonomian Kabupaten Tebo. Kemudian terdapat berbagai jasa lainnya seperti (perbankan dan jasa lainnya) dan perdagangan di perkotaan ini. Angkutan umum juga telah melayani perkotaan ini baik dalam Provinsi Jambi maupun ke luar Provinsi. Dan juga Ibukota-ibukota Kecamatan lainnya juga memiliki peranan cukup penting dalam memberikan pelayanan kepada penduduk dalam kegiatannya di tengah wilayah Kecamatannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunngja Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunngja Jambi

Atau beberapa Desa di wilayah sekitarnya terkait dengan hal tersebut maka telah dikemukakan sebelumnya mengenai beberapa hal pengertian yaitu:

- a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/kota
- b) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan.
- c) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang fungsinya untuk melayani kegiatan pada skala Kecamatan atau beberapa desa.

Maka dari itu pula, dengan memperhatikan fungsi dan keadaan geografi wilayah Kabupaten Tebo, maka hirarki pusat-pusat pemukiman sebagai pusat kegiatan dan pengembangan wilayah, dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a) Pusat pengembangan Utama

Pusat ini adalah pusat utama dari suatu wilayah. Biasanya pusat ini menghubungkan dengan pemusatan penduduk terbesar, keanekaragaman dalam kegiatan sekunder dan tersier. Dan pusat ini mempunyai kaitan yang sangat penting dengan perekonomian nasional.

- b) Pusat Pengembangan Kedua

Pusat permukiman ini adalah pusat hirarki kedua dalam suatu wilayah dan merupakan pusat dari suatu sub-wilayah. Pusat ini yaitu pusat pengembangan wilayah perdesaan yang paling besar, yaitu titik kritis dalam struktur ruang hirarkis yang memadu fungsi perkotaan dan perdesaan. Hal ini disebabkan karena pusat ini mempunyai fasilitas yang cukup lengkap seperti fasilitas pemasaran, memproses dan meningkatkan mutu hasil 40 pertanian, fasilitas keuangan, perdagangan, transportasi, dan fasilitas sosial. Pusat ini memainkan peranan yang sangat penting untuk menghubungkan pusat ketiga dengan pusat utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c) Pusat Pengembangan Ketiga

Pusat ini adalah pusat hirarki ketiga dalam suatu wilayah dan merupakan pusat- pusat pelayanan bagi wilayah pengaruhnya. Pusat ini berperan untuk mengumpulkan masukan-masukan (input-input) dari pusat yang lebih besar, yang dibutuhkan oleh penduduk dan kegiatan usaha di wilayah pengaruhnya dan secara serempak mengumpulkan hasil-hasil produksi wilayah pengaruhnya, kemudian menyalurkannya ke pusat kedua.

b. Kepadatan Penduduk Kabupaten Tebo

Berdasarkan dari data sensus penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Tebo dari tahun ke tahun terus bertambah. Dan jumlah penduduk Kabupaten Tebo antara tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2019-2021

| No | Kecamatan | Penduduk Jiwa | | |
|-----|----------------|---------------|--------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Tebo Tengah | 37.104 | 40.161 | 40.609 |
| 2. | Tebo Ilir | 27.017 | 28.314 | 28.525 |
| 3. | Sumay | 18.997 | 21.398 | 21.773 |
| 4. | Tebo Ulu | 33.853 | 33.011 | 33.087 |
| 5. | VII Koto | 19.291 | 19.958 | 20.093 |
| 6. | Rimbo Bujang | 64.624 | 63.320 | 63.492 |
| 7. | Rimbo Ilir | 23.131 | 23.408 | 23.528 |
| 8. | Rimbo Ulu | 37.573 | 37.586 | 37.759 |
| 9. | Tengah Ilir | 20.762 | 25.968 | 26.658 |
| 10. | VII Koto Ilir | 14.258 | 17.866 | 18.386 |
| 11. | Serai Serumpun | 8.186 | 9.551 | 9.738 |
| 12. | Muara Tabir | 16.845 | 17.128 | 17.237 |
| | Jumlah | 321.641 | 33.669 | 340.868 |

Sumber : Tebo dalam Angka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tebo terus bertambah dari tahun ke tahun, pertumbuhan bisa dilihat dari tahun 2019 penduduk Kabupaten Tebo sebesar 321.641 jiwa dan pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Tebo mencapai 340.868 jiwa.

Kemudian pertumbuhan penduduk tersebut dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan alami serta faktor pertumbuhan tidak alami yaitu adanya migrasi masuk ke wilayah Kabupaten Tebo seperti adanya transmigrasi maupun karena perkembangan pembangunan di Kabupaten Tebo. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Tebo hampir berimbang antara Laki-laki dengan Perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2021 di Kabupaten Tebo yaitu berjumlah 175.208 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan yaitu 165.660 jiwa. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tebo memeluk Agama Islam yaitu sebesar 96,72%. Penduduk yang beragama selain Islam relatif sangat sedikit yaitu 0,47% penduduk beragama Kristen Protestan; 0,49% penduduk beragama Kristen Katolik; 0,01% penduduk beragama Hindu; dan 0,01% penduduk beragama Budha.

c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan merupakan indikator pokok kualitas sumber daya besar penduduk Kabupaten Tebo yang berumur 10 tahun keatas tidak/belum tamat SD/ sederajat sebesar 32,03% dan tamat SD/ sederajat sebesar 20,23% dan tamat SLTA/ sederajat sebesar 10,81% Hanya sebagian kecil penduduk Kabupaten Tebo yang tamat D IV/ Sarjana yaitu 1,33%. Untuk lebih jelas bisa dilihat dari tabel berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Tabel 4.3

**Persentase Penduduk Kabupaten Tebo berumur 10 Tahun
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021**

| NO | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Persentase |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | Tidak/belum tamat SD | 32,03 |
| 2. | SD/MI/ sederajat | 32,29 |
| 3. | SLTP/MTs/ sederajat | 20,23 |
| 4. | SLTA/MA/ sederajat | 10,81 |
| 5. | SMK | 2,23 |
| 6. | D I/DII | 1,09 |
| 7. | D III/Sarjana Muda | 0,09 |
| 8. | D IV/Sarjana | 1,33 |

Sumber: Tebo Dalam Angka

d. Perekonomian Kabupaten Tebo

Pada Struktur perekonomian di Kabupaten Tebo sebagian besar masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sumbangan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Tebo yaitu total PDRB 53,81%. Laju pertumbuhan pada sektor ini tahun 2021 yaitu sebesar 3,73%. Peranan masing-masing kategori yang lain terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tebo berturut-turut dari yang terbesar dihasilkan oleh kategori pertambangan dan penggalian, kemudian kontributor terbesar kedua yaitu terhadap total PDRB adalah sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 10,31%, kemudian laju pertumbuhan pada sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor yaitu 5,26% pada tahun 2021. kontributor ketiga adalah sektor konstruksi pada tahun 2021 sebesar 6,67% , kemudian adalah sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 4,99% terhadap total PDRB Tahun 2021. Kontribusi terkecil berasal dari sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, yakni sebesar 0,04% dari total PDRB Tahun 2021. Laju pertumbuhan ekonomi

paling tinggi di tahun 2021 adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yakni sebesar 9,05%. Sektor tertinggi kedua yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu 8,38% pada tahun 2021.

Pendapatan Kabupaten Tebo terdiri dari sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Sesuai dengan UU nomor 25 tahun 1999, bahwa pendapatan asli daerah baik itu Kabupaten / Kota terdiri dari pajak, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan asli daerah yang asli. Dari beberapa sektor pendapatan asli daerah, perpajakan memiliki peranan paling besar dalam pendapatan asli daerah. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari sektor bagi hasil pajak atau bukan pajak, dan dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sedangkan dana pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pembangunan daerah.

Kabupaten tebo adalah salah satu daerah yang berada di provinsi jambi yang memiliki keuangan cukup baik realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.140,135 miliar pada tahun 2021 dengan komposisi terbesar berasal dari dana perimbangan mencapai Rp1.017,377 miliar atau 89% sisanya berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 84,76 miliar dan pendapatan lainnya sebesar Rp 38,01. Adapun jika dibandingkan tahun 2020 meningkat sebesar 7,62%. Pendapatan asli daerah kabupaten tebo paling besar masih disumbangkan oleh lain-lain PAD yang sah, sedangkan PAD paling kecil disumbangkan oleh retribusi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



e. Pengukuran Kinerja Pemerintah

a) Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan anggaran dalam arah untuk pencapaian misi dari hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses pelayanan publik.

Untuk mengukur kinerja, diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja pemerintah daerah memiliki ciri yang relatif lebih rumit jika dibandingkan dengan indikator kinerja organisasi privat karena indikator kinerja pada pemerintahan daerah adalah indikator kinerja non finansial secara lebih dominan dibandingkan dengan indikator finansial.

b) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator kinerja pemda, meliputi indikator *input*, *proses*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*

1) Indikator Proses (*Prosess*)

misalnya ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan jasa.

2) Indikator Keluaran (*Output*)

Misalnya jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketetapan dalam memproduksi barang atau jasa.

3) Indikator Hasil (*Outcome*)

Misalnya tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

4) Indikator Manfaat (*Benefit*)

Misalnya tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5) Indikator Impact

Misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Karakteristik pemda sebagai *pure profit organization* menempatkan organisasi ini mempunyai keunikan yang sangat berbeda dengan perusahaan bisnis. Pemda memiliki tanggung jawab besar dibidang ekonomi dan sosial secara bersama. Pengukuran kinerja pemda harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup yaitu pada sektor:

- 1) Pada sektor kondisi ekonomi nasional misalnya tingkat pertumbuhan produk domestik bruto, produk domestik bruto riil per kapita, tingkat tabungan, defisit/surplus keuangan daerah, utang dalam dan luar negeri, cadangan emas dan devisa.
- 2) Pada sektor lingkungan bisnis misalnya indeks kebebasan ekonomi, Perlindungan hak milik, Indeks persepsi korupsi dan Kebebasan bank.
- 3) Pada sektor stabilitas dan pengembangan misalnya sebaran pendapatan, paritas upah tenaga kerja pria/wanita, tingkat pengangguran, partisipasi politik, jumlah pengungsi, Kepastian hukum, jumlah kendaraan pribadi dan umum dan Kondisi keamanan daerah.
- 4) Pada sektor kesehatan meliputi, tingkat kelahiran maupun kematian, harapan hidup, tingkat kematian, program pemeliharaan kesehatan, pengeluaran untuk kesehatan, perbandingan penduduk dengan dokter/tenaga medis dan kecukupan gizi penduduk.
- 5) Pada sektor pendidikan meliputi, tingkat partisipasi pendidikan, anggaran pendidikan, kualitas tenaga pengajar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kecukupan sarana dan prasarana pendidikan, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan pendidikan.

c) Peran dan Manfaat Indikator Kinerja

Manfaat Indikator Kinerja yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan organisasi pemda.
- 2) Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas.
- 3) Tersedianya perbandingan kinerja antara waktu dalam organisasi.
- 4) Terjadinya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi dan individu manajer sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi kepada publik.

d) Penyusunan Indikator Kinerja

- 1) Susun dan tetapkan rencana strategis, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan dan sasaran
- 2) Identifikasi data/informasi yang dikembangkan dalam indikator kinerja secara relevan, lengkap, akurat dan kemampuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas untuk menyusun dan menetapkan untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.
- 3) Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan, program, kegiatan.

e) Aturan Pemerintah

Penyusunan indikator kinerja dan pelaporan kinerja di pemerintah diatur dengan menggunakan PP 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi di Pemerintahan.

Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

f) Syarat-syarat Indikator Kinerja

Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, syarat-syarat yang berlaku untuk semua kelompok kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
- 2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengatur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
- 3) Relevan indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan.
- 4) Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.
- 5) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

B. Hasil penelitian

a. Rasio kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah.



Tabel 4.4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Pinjaman (Rp) | Rasio Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------|
| 2017 | 74,975,148,932.52 | 967,527,597,497.35 | 7,74% | Instruktif |
| 2018 | 74,528,491,866.00 | 978,719,850,262.73 | 7,61% | Instruktif |
| 2019 | 77,086,096,526.34 | 1,039,565,190,989.35 | 7,41% | Instruktif |
| 2020 | 78,612,010,292.83 | 938,584,393,414.00 | 8,37% | Instruktif |
| 2021 | 73,682,370,443,44 | 976,249,559,908.00 | 7,54% | Instruktif |
| Total | | | 38,67% | |
| Rata-rata | | | 7,73% | |

Sumber Badan Keuangan Daerah Kab.Tebo (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 di atas kemampuan keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2019 dimana nilainya sebesar 7,41% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,37%. Sedangkan tahun tahun lainnya yaitu tahun 2017, 2018, dan 2021 masing-masing sebesar : 7,74%, 7,61%, dan 7,54%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi Belanja (Rp) | Realisasi Pendapatan (Rp) | REKD (%) | Kriteria |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 2017 | 805,634,829,756.30 | 1,014,817,095,528.92 | 79,38% | Efisien |
| 2018 | 878,860,323,749.78 | 1,099,896,407,343.83 | 79,90% | Efisien |
| 2019 | 935,252,564,219.17 | 1,157,280,009,284.13 | 80,81% | Cukup Efisien |
| 2020 | 842,932,846,239.48 | 1,085,601,955,507.19 | 77,64% | Efisien |
| 2021 | 964,953,562,563.25 | 1,167,195,696,528.30 | 82,67% | Cukup Efisien |
| Total | | | 400,4% | |
| Rata-rata | | | 80,08% | |

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 di atas Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2017 tergolong efisien karena interval efisiensinya diantara 60%-80%. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar dari pada realisasi belanja daerah. Tahun 2018 masih tergolong efisien karena nilai rasionya sudah di atas 80%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami tingkat cukup efisien karena rasionya 80% keatas, dan pada tahun 2021 efisiensinya tergolong cukup efisien yaitu

sebesar 82,67% . Hal ini diakibatkan terjadinya selisih antara pendapatan dengan belanja.

c. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rasio Keserasian (Belanja Operasional) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021

| Tahun | Total Belanja (Rp) | Total Belanja Operasional (Rp) | Rasio Belanja Operasional (%) |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2017 | 898,289,229,721.17 | 615,151,075,069.17 | 68,48% |
| 2018 | 945,370,363,340.57 | 663,861,707,464.57 | 70,22% |
| 2019 | 1,016,251,349,596.61 | 719,562,573,130.85 | 70,80% |
| 2020 | 949,000,804,009.68 | 719,936,988,673.60 | 75,86% |
| 2021 | 1,034,077,136,113.75 | 782,608,086,682.10 | 75,68% |
| Total | | | 361,04% |
| Rata-rata | | | 72,20% |

Sumber Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.6 di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi Bakeuda Kabupaten Tebo 72,20%. Dimulai pada tahun 2017 di mana rasio nya sebesar 68,48% naik pada tahun 2018 menjadi 70,22%, dan mengalami peningkatan lagi menjadi 70,80% pada tahun 2019. Tahun 2020 terus mengalami peningkatan

kembali menjadi 75,86%, kemudian tahun 2021 terjadi penurunan yaitu menjadi 75,68%.

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rasio Keserasian (Belanja Modal) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021

| Tahun | Total Belanja (Rp) | Total Belanja Modal (Rp) | Rasio Belanja Modal (%) |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2017 | 898,289,229,721.17 | 280,901,513,152.00 | 31,27% |
| 2018 | 945,370,363,340.57 | 280,008,655,876.00 | 29,61% |
| 2019 | 1,016,251,349,596.61 | 295,188,776,465.76 | 29,04% |
| 2020 | 949,000,804,009.68 | 149,808,355,745.21 | 15,78% |
| 2021 | 1,034,077,136,113.75 | 246,469,049,431.65 | 23,83% |
| Total | | | 129,53% |
| Rata-rata | | | 25,90% |

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.7. di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal Bakeuda Kabupaten Tebo 25,90%. Dimulai pada tahun 2017 dimana rasio nya sebesar 31,27% mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 29,61%, dan mengalami penurunan menjadi 29,04% pada tahun 2019. Tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 15,78%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 23,83%. Dilihat dari tabel diatas bahwa belanja modal Bakeuda Kabupaten Tebo dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan terus menerus.

③ Pembahasan Hasil Penelitian

a. Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Tebo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Tebo sebesar Rp. 74,975,148,932.52 Kemudian

mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu menjadi Rp. 74,528,491,866.00. Dan pada tahun 2019 PAD Kabupaten Tebo mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 77,086,096,526.34. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp. 78,612,010,292.83. Dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 73,682,370,443,44 dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 967,527,597,497.35, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 978,719,850,262.73. Pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,039,565,190,989.35, naik dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami penurunan sebesar atau menjadi Rp.938,584,393,414.00 pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 976,249,559,908.00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 kemampuan keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Berawal pada tahun 2017 Rasio Kemandirian sebesar 7,74%, kemudian turun menjadi 7,61% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Rasio Kemandirian sebesar 7,41% kemudian naik kembali pada tahun 2020 sebesar 8,37%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 7,54%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah yaitu sebesar 7,73% dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tebo dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Maka Kemandirian Keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Tebo sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 diketahui realisasi total belanja daerah Kabupaten Tebo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 rata-rata mengalami penurunan kecuali pada tahun 2019 dan 2021 dimana terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kenaikan belanja daerah. Pada tahun 2017 belanja daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp. 805,634,829,756.30, naik menjadi Rp. 878,860,323,749.78, pada tahun 2018. Kemudian naik kembali pada tahun 2019 menjadi Rp. 935,252,564,219.17. Kemudian turun sebesar Rp. 842,932,846,239.48 pada tahun 2020, kembali naik pada tahun 2021 menjadi Rp. 964,953,562,563.25.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tebo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 dimana terjadi penurunan realisasi pendapatan. Berawal dari tahun 2017 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1,014,817,095,528.92. Mengalami kenaikan menjadi Rp. 1,099,896,407,343.83 pada tahun 2018. Kembali naik pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,157,280,009,284.13, naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2020 terjadi penurunan sebesar menjadi Rp. 1,085,601,955,507.19. Dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 1,167,195,696,528.30.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 80,08% atau dapat dikatakan cukup efisien. Pada tahun 2017 rasio efisiensinya sebesar 79,38%, kemudian tahun 2018 menjadi 79,90%, tahun 2019 sebesar 80,81%, tahun 2020 sebesar 77,64%, dan tahun 2021 sebesar 82,67%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yang tergolong cukup efisien karena rata-rata rasionya 80,08% diakibatkan karena realisasi belanja daerahnya sudah lebih kecil dari pada realisasi pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2019 dan 2021. Meskipun pada tahun 2019 dan 2021 Pemerintah Kabupaten Tebo sudah dapat menekan belanjanya dari pada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Tebo dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



c. Rasio Keserasian

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 dan 4.7 dapat diketahui bahwa total belanja daerah Kabupaten Tebo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 belanja daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp. 898,289,229,721.17, naik menjadi Rp. 945,370,363,340.57 pada tahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp. 1,016,251,349,596.61, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 949,000,804,009.68, kemudian naik kembali pada tahun 2021 menjadi Rp. 1,034,077,136,113.75.

Total Belanja Operasional daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Vertikal Dalam Negeri selalu terjadi peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Masing-masing sebesar : Rp. 615,151,075,069.17, Rp. 663,861,707,464.57, Rp. 719,562,573,130.85, Rp. 719,936,988,673.60, dan Rp. 782,608,086,682.10. Sedangkan Total Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan, dari tahun 2017 sampai 2021 masing-masing yaitu sebesar: Rp.280,901,513,152.00, Rp. 280,008,655,876.00, Rp. 295,188,776,465.76, Rp. 149,808,355,745.21, dan Rp. 246,469,049,431.65

Dari tabel 4.6 dan 4.7 itu juga dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2017 Rasio Belanja Operasinya sebesar 68,48% dan naik pada tahun 2018 menjadi 70,22%, kemudian naik kembali pada tahun 2019 menjadi 70,80%, dan pada tahun 2020 naik menjadi 75,86%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 75,68%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 72,20%. Sedangkan pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2017 sebesar 31,27% turun menjadi 29,61 % pada tahun 2018, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pada tahun 2019, 2020, 2021 yaitu sebesar 29,04%, 15,78% dan 23,83%. sehingga rata-rata rasionya sebesar 25,90%

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk kebutuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada prioritas yang pasti untuk menggunakan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada kebutuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Tebo kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Tebo diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati oleh publik. Dan pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

d. Keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo Dalam Maqashid Syariah

Dalam konsep *maqashid syariah* tidak hanya dikaitkan dalam kehidupan pribadi tetapi juga sudah menyangkut kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan. Dalam praktiknya *maqashid syariah* dimungkinkan tidak akan sama dengan *maqashid syariah* yang ada pada tata kelola pemerintahan. Meskipun tidak sama baik dari ranah pribadi dan pemerintahan tetap menunjukkan interkoneksi, meskipun tidak sama realisasi belanja daerah terwujud dalam bentuk saling dapat dioperasikan.

Beberapa kesimpulan yang ada dalam penelitian ini adalah dalam pemberdayaan anggaran dalam tata kelola Pemerintahan diarahkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tebo dinilai lebih banyak mengarahkan anggaran daerah dan belanja daerahnya dalam pos-pos yang belum sepenuhnya diintegrasikan dengan *maqashid syariah* dalam penggunaan anggaran sejalan dan memposisikan anggaran yang berbasis *maqashid*. Dilihat dari hasil diatas bahwa keuangan Pemerintahan Kabupaten Tebo pendapatan masih rendah dan pengeluaran daerah masih cukup besar, Pemerintah sangat berperan penting dalam mengatur keuangan sehingga bisa menjaga sumber pendapatan dan melindungi pengeluaran sesuai dengan kaidah syariah. Kemudian Pemerintah harus cukup adil dalam mengelola sumber pendapatan yang ada di daerah sebagaimana dengan unsur-unsur dalam *maqashid syariah* yaitu salah satunya keadilan dalam mengelola anggaran maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. Sedangkan dalam kebijakan belanja keuangan publik, efisiensi dan keserasian belanja merupakan pokok kebijakan pengeluaran pemerintah.⁴⁸

Kemudian dalam tujuan *maqashid syariah* keadilan Pemerintah Kabupaten Tebo haruslah adil dalam masyarakat islam harus adil baik urusan sesama kaum muslim maupun non muslim. Tujuannya adalah untuk ditegakkannya keadilan bersama karena menyangkut berbagai aspek kehidupan dan dalam hal ini islam memandang bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Dan tujuan selanjutnya yang paling utama dalam *maqashid syariah* adalah kemaslahatan yang akan dicapai, yang harus terdapat dalam hukum islam. Dan masalah haruslah menyangkut semua kepentingan umum bukan kepentingan pihak tertentu agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁴⁸ Firman Muhammad Arif, “Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari’ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo,” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (July 20, 2019): hlm 72.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Kinerja Keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola Instrukturif. Hal ini berarti peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan 2021 rasionya masing-masing sebesar 7,74%, 7,61%, 7,41%, 8,37%, dan 7,54%.
2. Kinerja Keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 80,08% atau dikatakan cukup efisien. Berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan 2021 rasionya masing-masing sebesar 79,38%, 79,90%, 80,81%, 77,64%, dan 82,67%.
3. Kinerja Keuangan Bakeuda Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasional lebih besar dari dari belanja modal. Besarnya belanja operasional berada kisaran 48,10%-69,47% rata-rata sebesar 72,20%. Untuk belanja modal berada pada kisaran 30,28%-44,09%, kemudian rata-rata sebesar 25,90%. Dilihat dari rasio keserasian belanja operasional lebih besar dari pada belanja modal, sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tebo masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. Implikasi

Berdasarkan hasil dari analisis rasio yang memperlihatkan pada persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, maka Pemerintah Kabupaten Tebo supaya dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, maka ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat akan berkurang. Dan untuk persentase belanja modal yang mengalami penurunan dibandingkan belanja operasional yang persentasenya lebih tinggi. Diharapkan supaya tahun anggaran berikutnya agar pemerintah daerah Kabupaten Tebo dapat meningkatkan belanja modal.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah pendapatan asli daerah, kemudian inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat penting dalam upaya peningkatan PAD. Pada peningkatan PAD bisa dengan dilakukannya dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah. Kemudian Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan dalam hal ini Pemerintah Daerah memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari Pemerintah pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kemudian untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian ini yang sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat dari pada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Tebo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajnah Pentasihih Mushaf Al-Qur'an*. Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2005.

Buku

Abdul Helim, Maqosid Al-Syariah, 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Hendara Karianga. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Khusaini. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press, 2018.

Lailul Mursyidah, and Ilmi Usrotin Choiriyah. *Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah*. Umsida Press, 2020.

Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 4th ed. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019.

Mulia Andirfa. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Rosanna Purba. *Analisis Laporan Keuangan*. Sumatra Barat: PT Eksekutif Tekologi, 2023.

Sri Kusriyah. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Semarang: Unissula Press, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Purwanto. *Penyusunan Instrumen*. 1st ed. Magelang: StaiaPress, 2018.

Sudaryo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, 1st ed. (Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI, 2017).

Jurnal

Sari, Ifrita Indah, and Imawati Yousida. "Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 5, no. 1 (March 19, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi

Amin, Nurul. "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Iqtishaduna* (2014).

Andriani, Wiwik, Desi Handayani, Roni Putra, and Dini Marisa. "Perancangan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan EFA (Excel For Accounting)." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* (2021)

Aprilianda, Gusti Made Ayu, and Dr Candra Fajri Ananda. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur" (2014)

Arifiansyah, Farhadi, Risma Ayu Kinanti, and Duta Bintang Fitriyah. "Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy* 02 (2021)

Daniel Frangky Sambow. "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16 (2016).

Farida, Ai Siti, and Raden Faisal Maulana Nugraha. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 2 (December 10, 2019)

Harahap, Heri Faisal. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (March 19, 2020)

Karlina, Anis, and Nur Handayani. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (2017).

Prihantoro, Agung. "Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen." *Jurnal. unimus* 8 (2012)

Yani, Akhmad, and Zulkarnain Zulkarnain. "Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pontianak." *Widya Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (July 30, 2020)

Zainur, Zainur. "Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (December 30, 2020).

Firman Muhammad Arif, "Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (July 20, 2019): hlm 72.

Lampiran 01

Surat Keterangan Penelitian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serangkuh Dayung
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
Email : dpmptpkukm17@gmail.com Kode Pos :37571
MUARA TEBO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/ 2G /DPMPTSPKUKM/2023

Menindaklanjuti Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Nomor B-1179 D.V/D.V.3/PP.00.9/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Surat Keterangan Penelitian, serta berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1983 Tanggal 9 November 1983 Tentang Pedoman Pendataan Sumber Potensi Pembangunan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.
5. Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070 / 26 / KESBANGPOL / 2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Rekomendasi Izin Riset/ Penelitian atas nama Miftakur Rochmad.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo memberikan surat keterangan penelitian kepada :

Nama : Miftakur Rochmad
Nomor Mahasiswa : 504190049
Judul Penelitian : *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo*
Tempat Penelitian : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
Waktu Penelitian : 14 Maret 2023s/d 14 Juni 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah penelitian harus melapor kepada pejabat pemerintah setempat untuk mendapatkan informasi tentang daerah yang bersangkutan;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat daerah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian;
4. Untuk mencegah penyebaran Wabah Covid-19 agar saudara tidak melibatkan orang banyak dengan penelitian saudara dan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19;
5. Menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo;


6. Surat izin / riset penelitian ini akan dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 10 Mei 2023

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO

HERU PURNOMO, SE
Pembina TK.I
NIP. 19800908 200604 1 006




Ditandatangani secara elektronik

Lampiran 02

Surat Bukti Telah Melakukan Izin Penelitian dan Permintaan Data Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Lintas Tebo - Bungo KM. 12 Kode POS 37271
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp./Fax. (0744) 21530. email : keuda.tebo@gmail.com
MUARA TEBO

Muara Tebo, 27 Mei 2023
Dzulqaidah 1444 H


| | | |
|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| Nomor | : 900/ 074 /BAKEUDA-I/2023 | Kepada Yth, |
| Sifat | : Biasa | Sdr. Dekan Bidang Kemahasiswaan |
| Lampiran | : - | dan Kerjasama Universitas Islam |
| Perihal | : Izin Riset/ Penelitian dan | Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| | Permintaan Data Skripsi | Di - |
| | | Jambi |

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor. B-1179/D.V/D.V.3/PP.00.0/03/2023 perihal Mohon Izin Mengadakan Riset/ Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat member izin untuk melakukan Riset/ Penelitian dan Permintaan data Skripsi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Kepada Mahasiswa :

| | |
|-------|---|
| Nama | : MIFTAKUR ROHMAD |
| NIM | : 504190049 |
| Judul | : Analis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. |

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mempercepat proses penyiapan data yang dibutuhkan untuk penelitian, kami harap kiranya format/isian data yang dibutuhkan disampaikan terlebih dahulu kepada kami agar data yang dibutuhkan dapat akurat dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tebo
Sekretaris

Romy Candra, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19764203 200312 1007

Lampiran 03

Laporan Keuangan Bakeuda Tebo Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN 2017

| No. | Uraian | Anggaran 2017 | Realisasi 2017 |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 16,493,000,000.00 | 17,472,685,794.00 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 7,982,593,900.00 | 5,625,166,665.00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5,553,650,401.52 | 5,153,650,401.52 |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 44,945,904,631.00 | 40,154,623,167.29 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 74,975,148,932.52 | 68,406,126,027.81 |
| 8 | PENDAPATAN TRANSFER | | |
| 9 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | |
| 10 | Dana Bagi Hasil Pajak | 50,917,318,127.00 | 32,566,882,466.00 |
| 11 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 44,541,893,302.00 | 37,080,751,403.00 |
| 12 | Dana Alokasi Umum | 582,313,417,000.00 | 582,313,417,000.00 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus | 139,749,991,000.00 | 128,796,424,328.00 |
| 14 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 817,522,619,429.00 | 780,757,475,197.00 |
| 15 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | |
| 16 | Dana Otonomi Khusus | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Dana Penyesuaian | 93,379,314,000.00 | 93,379,314,000.00 |
| 18 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 93,379,314,000.00 | 93,379,314,000.00 |
| 19 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | |
| 20 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 46,905,664,068.35 | 44,554,180,304.11 |
| 21 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 9,720,000,000.00 | 9,720,000,000.00 |
| 22 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 56,625,664,068.35 | 54,274,180,304.11 |
| 23 | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 967,527,597,497.35 | 928,410,969,501.11 |
| 24 | | | |
| 25 | Pendapatan Hibah | 18,000,000,000.00 | 18,000,000,000.00 |
| 26 | Pendapatan Dana Darurat | 0.00 | 0.00 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

| | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 27 | Pendapatan Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | 18,000,000,000.00 | 18,000,000,000.00 |
| 29 | JUMLAH PENDAPATAN | 1,060,502,746,429.87 | 1,014,817,095,528.92 |
| 30 | BELANJA | | |
| 31 | BELANJA OPERASI | | |
| 32 | Belanja Pegawai | 396,181,147,145.17 | 370,613,698,715.00 |
| 33 | Belanja Barang | 206,325,339,924.00 | 187,072,686,301.97 |
| 34 | Bunga | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Subsidi | 5,893,788,000.00 | 5,670,504,000.00 |
| 36 | Hibah | 6,750,800,000.00 | 6,504,800,000.00 |
| 37 | Bantuan Sosial | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Jumlah Belanja Operasi | 615,151,075,069.17 | 569,861,689,016.97 |
| 39 | BELANJA MODAL | | |
| 40 | Belanja Tanah | 1,193,075,000.00 | 839,295,000.00 |
| 41 | Belanja Peralatan dan Mesin | 34,242,505,636.00 | 29,670,042,378.33 |
| 42 | Belanja Gedung dan Bangunan | 36,521,428,000.00 | 33,058,111,461.00 |
| 43 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 207,170,982,366.00 | 169,694,477,400.00 |
| 44 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 1,773,522,150.00 | 426,133,000.00 |
| 45 | Belanja Aset Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Jumlah Belanja Modal | 280,901,513,152.00 | 233,688,059,239.33 |
| 47 | BELANJA TAK TERDUGA | | |
| 48 | Belanja Tak Terduga | 2,236,641,500.00 | 2,085,081,500.00 |
| 49 | Jumlah Belanja Tak Terduga | 2,236,641,500.00 | 2,085,081,500.00 |
| 50 | JUMLAH BELANJA | 898,289,229,721.17 | 805,634,829,756.30 |
| 51 | TRANSFER | | |
| 52 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 2,446,881,390.00 | 2,375,023,474.00 |
| 53 | Transfer Bagi Hasil Pajak | 1,649,300,000.00 | 1,606,735,362.00 |
| 54 | Transfer Bagi Hasil Retribusi | 797,581,390.00 | 768,288,112.00 |
| 55 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| 54 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 159,701,912,900.08 | 159,641,912,900.08 |
| 55 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya | 158,657,968,800.00 | 158,597,968,800.00 |
| 55 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 1,043,944,100.08 | 1,043,944,100.08 |
| 56 | JUMLAH TRANSFER | 162,148,794,290.08 | 162,016,936,374.08 |
| 57 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 1,060,438,024,011.25 | 967,651,766,130.38 |
| 58 | SURPLUS/DEFISIT | 64,722,418.62 | 47,165,329,398.54 |
| 59 | PEMBIAYAAN | | |
| 60 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | |
| 61 | Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya | 8,261,120,077.38 | 8,261,120,077.38 |

| | | | |
|----|--|-------------------------|-------------------------|
| 61 | Pencairan Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 8,261,120,077.38 | 8,261,120,077.38 |
| 63 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | |
| 64 | Pembentukan Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | 8,325,842,496.00 | 7,258,415,260.00 |
| 67 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 8,325,842,496.00 | 7,258,415,260.00 |

Lampiran 04

Laporan Keuangan Bakeuda Tebo Tahun 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN 2018

| No | Uraian | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 18,106,000,000.00 | 21,931,897,709.14 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 4,936,000,000.00 | 2,881,595,963.00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7,000,000,000.00 | 6,164,069,343.32 |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 44,486,491,866.00 | 45,182,465,602.51 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 74,528,491,866.00 | 76,160,028,617.97 |
| 8 | PENDAPATAN TRANSFER | | |
| 9 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | |
| 10 | Dana Bagi Hasil Pajak | 35,474,780,000.00 | 38,172,710,610.00 |
| 11 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 31,155,432,000.00 | 55,431,716,603.00 |
| 12 | Dana Alokasi Umum | 582,313,417,000.00 | 582,313,417,000.00 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus | 139,842,780,000.00 | 130,525,854,971.00 |
| 14 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 788,786,409,000.00 | 806,443,699,184.00 |
| 15 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | |
| 16 | Dana Penyesuaian | 118,390,792,000.00 | 118,390,792,000.00 |
| 17 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 118,390,792,000.00 | 118,390,792,000.00 |
| 18 | TRANSFER PEMERINTAH | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | PROVINSI | | |
| 19 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 61,822,649,262.73 | 48,970,207,541.86 |
| 20 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 9,720,000,000.00 | 6,720,000,000.00 |
| 21 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 71,542,649,262.73 | 55,690,207,541.86 |
| 22 | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER | 978,719,850,262.73 | 980,524,698,725.86 |
| 23 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | |
| 24 | Pendapatan Hibah | 0.00 | 2,000,000,000.00 |
| 25 | Pendapatan Lainnya | 41,525,200,000.00 | 41,211,680,000.00 |
| 26 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | 41,525,200,000.00 | 43,211,680,000.00 |
| 27 | JUMLAH PENDAPATAN | 1,094,773,542,128.73 | 1,099,896,407,343.83 |
| 28 | BELANJA | | |
| 29 | BELANJA OPERASI | | |
| 30 | Belanja Pegawai | 393,917,070,283.49 | 378,075,170,393.00 |
| 31 | Belanja Barang | 251,102,483,181.08 | 222,186,709,694.92 |
| 32 | Subsidi | 5,130,504,000.00 | 4,737,204,000.00 |
| 33 | Hibah | 13,711,650,000.00 | 13,276,624,000.00 |
| 34 | Jumlah Belanja Operasi | 663,861,707,464.57 | 618,275,708,087.92 |
| 35 | BELANJA MODAL | | |
| 36 | Belanja Tanah | 229,000,000.00 | 128,283,000.00 |
| 37 | Belanja Peralatan dan Mesin | 37,434,308,841.00 | 30,787,198,601.79 |
| 38 | Belanja Gedung dan Bangunan | 28,122,287,985.00 | 26,731,950,081.11 |
| 39 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 211,262,091,900.00 | 198,896,766,534.96 |
| 40 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 2,960,967,150.00 | 2,446,628,099.00 |
| 41 | Jumlah Belanja Modal | 280,008,655,876.00 | 258,990,826,316.86 |
| 42 | BELANJA TAK TERDUGA | | |
| 43 | Belanja Tak Terduga | 1,500,000,000.00 | 1,593,789,345.00 |
| 44 | Jumlah Belanja Tak Terduga | 1,500,000,000.00 | 1,593,789,345.00 |
| 45 | JUMLAH BELANJA | 945,370,363,340.57 | 878,860,323,749.78 |
| 46 | TRANSFER | | |
| 47 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 2,304,200,000.00 | 2,239,118,357.00 |
| 48 | Transfer Bagi Hasil Pajak | 1,810,600,000.00 | 1,751,255,909.00 |
| 49 | Transfer Bagi Hasil Retribusi | 493,600,000.00 | 487,862,448.00 |
| 50 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 165,242,472,500.08 | 165,183,472,500.08 |
| 51 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya | 164,198,528,400.00 | 164,139,528,400.00 |
| 52 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 1,043,944,100.08 | 1,043,944,100.08 |
| 53 | JUMLAH TRANSFER | 167,546,672,500.08 | 167,422,590,857.08 |
| 54 | JUMLAH BELANJA DAN | 1,112,917,035,840. | 1,046,282,914,606.86 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

| | | | |
|----|--|---------------------------|--------------------------|
| | TRANSFER | 65 | |
| 55 | SURPLUS/DEFISIT | -18,143,493,711.92 | 53,613,492,736.97 |
| 56 | PEMBIAYAAN | | |
| 57 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | |
| 58 | Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya | 48,168,034,215.92 | 48,168,034,215.92 |
| 59 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 48,168,034,215.92 | 48,168,034,215.92 |
| 60 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | |
| 61 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 6,236,750,000.00 | 6,236,750,000.00 |
| 62 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | 23,787,790,504.00 | 23,719,537,507.00 |
| 63 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 30,024,540,504.00 | 29,956,287,507.00 |

Lampiran 05

Laporan Keuangan Bakeuda Tebo Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN 2019

| No | Uraian | Anggaran 2019 | Realisasi 2019 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| | PENDAPATAN | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 20,012,500,000.00 | 26,218,318,878.96 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 4,443,000,000.00 | 3,266,061,850.00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,680,579,920.34 | 6,680,579,920.34 |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 45,950,016,606.00 | 47,071,412,822.95 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 77,086,096,526.34 | 83,236,373,472.25 |
| | PENDAPATAN TRANSFER | | |
| | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | |
| 10 | Dana Bagi Hasil Pajak | 35,314,787,000.00 | 31,877,536,315.00 |
| 11 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 65,259,549,000.00 | 56,981,824,737.00 |
| 12 | Dana Alokasi Umum | 598,297,279,000.00 | 598,297,279,000.00 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus | 170,630,596,000.00 | 155,163,099,438.00 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

| | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 14 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 869,502,211,000.00 | 842,319,739,490.00 |
| 15 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | |
| 16 | Dana Penyesuaian | 105,115,708,000.00 | 105,115,708,000.00 |
| 17 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 105,115,708,000.00 | 105,115,708,000.00 |
| 18 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | |
| 19 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 52,227,271,989.35 | 60,297,111,310.72 |
| 20 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 12,720,000,000.00 | 12,720,000,000.00 |
| 21 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 64,947,271,989.35 | 73,017,111,310.72 |
| 22 | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 1,039,565,190,989.35 | 1,020,452,558,800.72 |
| 23 | Pendapatan Hibah | 49,479,370,000.00 | 53,386,320,000.00 |
| 24 | Pendapatan Lainnya | 0.00 | 204,757,011.16 |
| 26 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | 49,479,370,000.00 | 53,591,077,011.16 |
| 27 | JUMLAH PENDAPATAN | 1,166,130,657,515.69 | 1,157,280,009,284.13 |
| 28 | BELANJA | | |
| 29 | BELANJA OPERASI | | |
| 30 | Belanja Pegawai | 426,327,989,944.00 | 396,714,731,907.16 |
| 31 | Belanja Barang | 270,836,920,987.85 | 249,217,384,732.07 |
| 32 | Belanja Subsidi | 4,338,225,199.00 | 4,309,236,199.00 |
| 33 | Belanja Hibah | 18,059,437,000.00 | 14,901,506,005.24 |
| 34 | Jumlah Belanja Operasi | 719,562,573,130.85 | 665,142,858,843.47 |
| 35 | BELANJA MODAL | | |
| 36 | Belanja Modal Tanah | 411,000,000.00 | 409,630,000.00 |
| 37 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 49,742,979,140.31 | 32,462,722,224.89 |
| 38 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 37,834,555,170.00 | 36,980,546,223.39 |
| 39 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 196,451,273,009.45 | 189,764,605,345.42 |
| 40 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 10,748,969,146.00 | 9,476,187,582.00 |
| 41 | Jumlah Belanja Modal | 295,188,776,465.76 | 269,093,691,375.70 |
| 42 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | |
| 43 | Belanja Tidak Terduga | 1,500,000,000.00 | 1,016,014,000.00 |
| 44 | Jumlah Belanja Tak Terduga | 1,500,000,000.00 | 1,016,014,000.00 |
| 45 | JUMLAH BELANJA | 1,016,251,349,596.61 | 935,252,564,219.17 |
| 46 | TRANSFER | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

| | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 47 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 2,143,900,000.00 | 2,063,964,263.00 |
| 48 | Transfer Bagi Hasil Pajak | 1,650,300,000.00 | 1,627,968,878.00 |
| 49 | Transfer Bagi Hasil Retribusi | 493,600,000.00 | 435,995,385.00 |
| 50 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 182,526,904,600.08 | 182,519,045,945.00 |
| 51 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa | 181,482,960,500.00 | 181,482,960,500.00 |
| 52 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 1,043,944,100.08 | 1,036,085,445.00 |
| 53 | JUMLAH TRANSFER | 184,670,804,600.08 | 184,583,010,208.00 |
| 54 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 1,200,922,154,196.69 | 1,119,835,574,427.17 |
| 55 | SURPLUS/DEFISIT | -34,791,496,681.00 | 37,444,434,856.96 |
| 56 | PEMBIAYAAN | | |
| 57 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | |
| 58 | Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya | 71,825,239,446.00 | 71,825,239,445.89 |
| 59 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 71,825,239,446.00 | 71,825,239,445.89 |
| 60 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | |
| 61 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 14,000,000,000.00 | 14,000,000,000.00 |
| 62 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | 23,033,742,765.00 | 22,671,358,300.00 |
| 63 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 37,033,742,765.00 | 36,671,358,300.00 |

Lampiran 06

Laporan Keuangan Bakeuda Tebo Tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN 2020

| No | Uraian | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| | PENDAPATAN | | |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 17,669,500,000.00 | 19,173,167,414.95 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | 4,473,500,000.00 | 3,017,427,010.00 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8,221,154,218.83 | 8,221,154,218.83 |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 48,247,856,074.00 | 48,047,675,738.97 |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 78,612,010,292.83 | 78,459,424,382.75 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

| | | | |
|----|---|----------------------------|----------------------------|
| 8 | PENDAPATAN TRANSFER | | |
| 9 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - | | |
| 10 | DANA PERIMBANGAN | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | 32,582,750,960.00 | 23,471,010,678.00 |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 32,943,994,835.00 | 58,629,557,156.00 |
| 13 | Dana Alokasi Umum | 536,524,337,000.00 | 534,449,531,000.00 |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | 145,864,377,080.00 | 139,513,733,281.00 |
| 15 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - | | |
| 16 | Dana Perimbangan (10 s.d. 13) | 747,915,459,875.00 | 756,063,832,115.00 |
| 17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - | | |
| 18 | LAINNYA | | |
| 19 | Dana Penyesuaian | 135,720,310,000.00 | 135,720,310,000.00 |
| 20 | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - | | |
| 21 | Lainnya | 135,720,310,000.00 | 135,720,310,000.00 |
| 22 | TRANSFER PEMERINTAH | | |
| 23 | PROVINSI | | |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 45,228,623,539.00 | 52,721,073,609.35 |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 9,720,000,000.00 | 6,720,000,000.00 |
| 26 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 54,948,623,539.00 | 59,441,073,609.35 |
| 27 | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 28 | TRANSFER | 938,584,393,414.00 | 951,225,215,724.35 |
| 29 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG | | |
| 30 | SAH | | |
| 31 | Pendapatan Hibah | 49,581,690,000.00 | 55,889,690,000.00 |
| 32 | Pendapatan Lainnya | 0.00 | 27,625,400.09 |
| 33 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | 49,581,690,000.00 | 55,917,315,400.09 |
| 34 | | 1,066,778,093,706.8 | 1,085,601,955,507.1 |
| 35 | JUMLAH PENDAPATAN | 3 | 9 |
| 36 | BELANJA | | |
| 37 | BELANJA OPERASI | | |
| 38 | Belanja Pegawai | 410,403,515,628.04 | 381,775,563,547.00 |
| 39 | Belanja Barang | 295,430,454,545.56 | 276,394,789,919.06 |
| 40 | Subsidi | 6,342,018,500.00 | 6,317,601,500.00 |
| 41 | Hibah | 7,761,000,000.00 | 6,901,100,000.00 |
| 42 | Jumlah Belanja Operasi | 719,936,988,673.60 | 671,389,054,966.06 |
| 43 | BELANJA MODAL | | |
| 44 | Belanja Tanah | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Belanja Peralatan dan Mesin | 60,905,560,931.50 | 52,344,167,038.00 |
| 46 | Belanja Gedung dan Bangunan | 36,148,486,578.00 | 35,739,130,045.71 |
| 47 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 45,322,954,112.71 | 44,486,617,578.71 |
| 48 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 7,431,354,123.00 | 7,286,073,381.00 |
| 49 | Jumlah Belanja Modal | 149,808,355,745.21 | 139,855,988,043.42 |
| 50 | BELANJA TAK TERDUGA | | |
| 51 | Belanja Tak Terduga | 79,255,459,590.87 | 31,687,803,230.00 |
| 52 | Jumlah Belanja Tak Terduga | 79,255,459,590.87 | 31,687,803,230.00 |
| 53 | JUMLAH BELANJA | 949,000,804,009.68 | 842,932,846,239.48 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

| | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 46 | TRANSFER | | |
| 47 | TRANSFER BAGI HASIL | | |
| 48 | PENDAPATAN | 2,214,300,000.00 | 2,214,300,000.00 |
| 49 | Transfer Bagi Hasil Pajak | 1,766,950,000.00 | 1,766,950,000.00 |
| 50 | Transfer Bagi Hasil Retribusi | 447,350,000.00 | 447,350,000.00 |
| 51 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 176,659,760,700.00 | 176,636,184,732.00 |
| 52 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya | 175,615,816,600.00 | 175,615,816,600.00 |
| 53 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 1,043,944,100.00 | 1,020,368,132.00 |
| 54 | JUMLAH TRANSFER | 178,874,060,700.00 | 178,850,484,732.00 |
| 55 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 1,127,874,864,709.68 | 1,021,783,330,971.48 |
| 56 | SURPLUS/DEFISIT | -61,096,771,002.85 | 63,818,624,535.71 |
| 57 | PEMBIAYAAN | | |
| 58 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | |
| 59 | Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya | 72,598,316,002.85 | 72,598,316,002.85 |
| 60 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 72,598,316,002.85 | 72,598,316,002.85 |
| 61 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 11,501,545,000.00 | 11,500,600,000.00 |
| 63 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 11,501,545,000.00 | 11,500,600,000.00 |

Lampiran 07

Laporan Keuangan Bakeuda Tebo Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN 2021

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| | PENDAPATAN | | |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 17,874,500,000.00 | 22,539,888,831.22 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 4,468,000,000.00 | 2,830,768,040.00 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8,615,139,241.44 | 8,777,303,549.16 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 42,724,731,202.00 | 58,767,315,220.58 |
| 5 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 73,682,370,443.44 | 92,915,275,640.96 |
| 6 | PENDAPATAN TRANSFER | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | 19,377,466,000.00 | 51,152,405,297.00 |
| | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 39,941,438,954.00 | 54,295,903,112.00 |
| | Dana Alokasi Umum | 528,393,374,000.00 | 528,393,374,000.00 |
| | Dana Alokasi Khusus | 204,029,564,000.00 | 196,470,549,742.00 |
| | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 791,741,842,954.00 | 830,312,232,151.00 |
| | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | |
| | Dana Penyesuaian | 120,256,498,000.00 | 120,256,472,380.00 |
| | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 120,256,498,000.00 | 120,256,472,380.00 |
| | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | |
| | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 57,531,218,954.00 | 60,088,892,151.00 |
| | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 6,720,000,000.00 | 6,720,000,000.00 |
| | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 64,251,218,954.00 | 66,808,892,151.00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 976,249,559,908.00 | 1,017,377,596,682.00 |
| | Pendapatan Hibah | 0.00 | 11,230,000,000.00 |
| | Pendapatan Hibah Dana BOS | 45,673,359,541.75 | 45,672,824,205.34 |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | 45,673,359,541.75 | 56,902,824,205.34 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1,095,605,289,893.19 | 1,167,195,696,528.30 |
| | BELANJA | | |
| | BELANJA OPERASI | | |
| | Belanja Pegawai | 406,415,140,428.71 | 395,520,603,353.00 |
| | Belanja Barang | 332,505,267,329.39 | 301,502,764,818.14 |
| | Subsidi | 1,070,513,315.00 | 1,070,513,315.00 |
| | Hibah | 42,617,165,609.00 | 41,924,077,319.00 |
| | Jumlah Belanja Operasi | 782,608,086,682.10 | 740,017,958,805.14 |
| | BELANJA MODAL | | |
| | Belanja Tanah | 0.00 | 0.00 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 46,285,100,804.00 | 31,186,838,055.00 |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | 64,921,896,190.00 | 57,478,356,391.03 |
| | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 129,530,609,740.65 | 127,881,482,652.08 |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | 5,731,442,697.00 | 5,666,042,280.00 |
| | Jumlah Belanja Modal | 246,469,049,431.65 | 222,212,719,378.11 |
| | BELANJA TAK TERDUGA | | |
| | Belanja Tak Terduga | 5,000,000,000.00 | 2,722,884,380.00 |
| | Jumlah Belanja Tak Terduga | 5,000,000,000.00 | 2,722,884,380.00 |
| | JUMLAH BELANJA | 1,034,077,136,113.7 | 964,953,562,563.25 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

| | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 5 | |
| 46 | TRANSFER | | |
| 47 | TRANSFER BAGI HASIL | | |
| 48 | PENDAPATAN | 2,234,400,000.00 | 2,202,349,122.00 |
| 49 | Transfer Bagi Hasil Pajak | 1,787,450,000.00 | 1,763,753,307.00 |
| 49 | Transfer Bagi Hasil Retribusi | 446,950,000.00 | 438,595,815.00 |
| 50 | TRANSFER BANTUAN | | |
| 50 | KEUANGAN | 179,710,094,318.00 | 178,604,371,780.00 |
| 51 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya | 179,710,094,318.00 | 178,604,371,780.00 |
| 52 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| 53 | JUMLAH TRANSFER | 181,944,494,318.00 | 180,806,720,902.00 |
| 54 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 1,216,021,630,431.75 | 1,145,760,283,465.25 |
| 55 | SURPLUS/DEFISIT | -120,416,340,538.56 | 21,435,413,063.05 |
| 56 | PEMBIAYAAN | | |
| 57 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | |
| 58 | Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya | 124,916,340,538.56 | 124,916,340,538.56 |
| 59 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 124,916,340,538.56 | 124,916,340,538.56 |
| 60 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 62 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |

CURRICULUM VITAE



Nama : Miftakur Rohmad
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Rimbo Bujang, 18 Desember 2001
Nim : 504190049
Alamat : Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Email : miftakur18@gmail.com
Nomor Hp : 0853-8013-8021
Nama Ayah : Rohmad
Nama Ibu : Siti Kholifah
Pekerjaan Orang Tua : Petani/Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Latar Belakang Pendidikan
Sekolah Dasar : SD Negeri 189 Pematang Sapat
Sekolah Menengah Pertama : MTs Negeri Rimbo Mulyo Kabupaten Tebo
Sekolah Menengah Atas : MA Swasta Pondok Pesantren Raudhatul
Mujawwidin
Motto Hidup : “ Jangan terlalu NYAMAN pada KEADAAN
yang tidak akan MEMBAWAMU KEMANA-
MANA “